



**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2015-2018**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Akuntansi dan Keuangan Syariah*

Oleh

**MONALISAH HARAHAHAP
NIM. 16 402 00006**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2015-2018**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Akuntansi dan Keuangan Syariah*

Oleh

MONALISAH HARAHAHAP

NIM. 16 40 200006

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M

Ja'far Nasution LC., M.E.I

NIP. 19790720 201101 1 005

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2020**

Hal : Lampiran Skripsi

Lampiran : a.n. **MONALISAH HARAHAHAP**
: 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, Februari 2020
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di-
Padangsidempuan

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **MONALISAH HARAHAHAP** yang berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2018”**.

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M
NIP:197907201101 1 005

Ja'far Nasution LC., M.E.I

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Monalisah Harahap**
NIM : 16 402 00006
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2018.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Februari 2020
Saya yang Menyatakan,

Materai

Monalisah Harahap
NIM. 16 402 00006

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Monalisah Harahap
NIM : 16 402 00006
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2018.**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Padatanggal : Februari 2020
Yang menyatakan,

Materai

Monalisah Harahap
NIM. 16 402 00006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : MONALISAH HARAHAHAP
NIM : 1640200006
FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah AK-2
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2018.

Ketua

Sekretaris

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Delima Sari Lubis, MA
NIP. 19840512 201403 2 002

Anggota

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Delima Sari Lubis, MA
NIP. 19840512 201403 2 002

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M
NIP. 19790720 201101 1 005

Nurul Izzah, M.Si
NIP. 19900122 201801 2 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jumat/12 Juni 2020
Pukul : 14.00 WIB s/d 16.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/74,75 (B)
Index Prestasi Kumulatif : 3,74
Predikat : CUMLAUDE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H.TengkuRizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2015-2018**

NAMA : MONALISAH HARAHAHAP
NIM : 16 402 00006

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, Juni 2020
Dekan,

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : MONALISAH HARAHAHAP
NIM : 16 402 00006
Judul Skripsi : Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2018.

Terjadinya fluktuasi pada pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018 dipengaruhi oleh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami fluktuasi yang bertentangan dengan teori pada tahun 2015-2018. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018 dan apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah apabila penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan maka pendapatan asli daerah akan meningkat, dan apabila retribusi daerah mengalami peningkatan maka pendapatan asli daerah akan meningkat, begitu juga sebaliknya apabila penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami penurunan maka pendapatan asli daerah akan menurun.

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kuantitatif yang menggunakan data sekunder dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 32 sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dan dokumentasi, dan teknik analisis data yakni uji estimasi data panel, uji pemilihan model estimasi data panel, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji analisis regresi berganda dengan bantuan *software* *views* versi 9.

Hasil penelitian menunjukkan, pengujian secara parsial (t) variabel penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara 2015-2018. Sedangkan variabel retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara 2015-2018. Secara simultan (uji F) dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara 2015-2018.

Kata kunci: Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR



Assalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2018”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Rektor IAIN Padangsidimpuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., Selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak/Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd, M.M selaku pembimbing I dan Bapak Ja'far Nasution LC., M.E.I selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada Ayahanda Akhir Harahap dan Ibunda tercinta Nurita Ritonga yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dialah dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi

dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, serta kepada Kakak dan Adik-adik (Nur Asiah Harahap, Toni Harahap, Fitria Harahap) dan tak lupa juga kepada saudara-saudari peneliti yaitu Beta Asteria, Muhammad Iqbal, Widhi Sunardika, Novriyanti Jambak, dan Mardani Nursali yang sudah memberi bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Untuk sahabat peneliti Putri Aulia Hutasuhut, Nurhalima, Ira Widia Putri, Seri Hartina, Anni Cholilah Dalimunthe, Sari Ayu Pulungan, Afrilina Yanti Siagian, Fitrah Hannum Jambak, Sani Siregar, Iis Hanifah Hasibuan, Masdawani Lubis, Lia Amalia, Desi Anggi Rahmadani, Mimi Lomona, Erna Wati, Dista Mutia, Dina Oktavia, Ihsan Mulia, Indra Saputra, Masreni, Dinda Alwiyah, Syukriah, Nelly Sulviana, Desi Nurliamin, Ummi Hany, Nurul Ilmi, Arinda Siregar, Khairani Hsb, Sri Wahyuni, Riska Yanti, Nora Anggraini, Mirna Maysarah, Lisa Ismayani, Rahmi Amanda Sakinah, Ainun Fadilah, Resi Mariana, Julianita, Winda Sari, Mujahidun Pane dan rekan-rekan Ekonomi Syariah 6 Akuntansi-2, angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. Serta pejuang subuh dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan karya ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin yarabbalamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Februari 2020

Peneliti,

Monalisah Harahap
NIM. 16 402 00006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathāh	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathāh dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI UJIAN *MUNAQASYAH* SKRIPSI

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Definisi Operasional Variabel	8
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Kegunaan Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori	14
1. Pendapatan Asli Daerah	14
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	14

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah	18
c. Komponen Kebijakan Fiskal Islam Pada Masa Rasulullah.....	20
2. Penerimaan Pajak Daerah	23
a. Pengertian Penerimaan Pajak Daerah	23
b. Fungsi Pajak Daerah	24
c. Jenis-Jenis Pajak Daerah	25
d. Tarif Pajak Daerah	29
3. Retribusi Daerah	30
a. Pengertian Retribusi Daerah	30
b. Jenis-Jenis Retribusi Daerah	31
c. Tatacara Perhitungan Retribusi Daerah	34
d. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah	35
4. Hubungan Pajak Daerah terhadap PAD	37
5. Hubungan Retribusi Daerah Terhadap PAD	37
B. Penelitian Terdahulu	38
C. Kerangka Pikir	42
D. Hipotesis Penelitian.....	43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
2. Jenis Penelitian	44
3. Populasi dan Sampel.....	44
1. Populasi	44
2. Sampel	46
4. Jenis dan Sumber Data	48
5. Instrumen Pengumpulan Data	48
1. Studi Kepustakaan	49
2. Studi Dokumentasi	49
a. Penerimaan Pajak Daerah	49
b. Retribusi Daerah	49

c. Pendapatan Asli Daerah	50
6. Analisis Data	50
1. Uji Estimasi Data Panel	50
a. <i>Common Effects Model</i>	51
b. <i>Fixed Effects Model</i>	51
c. <i>Random Effects Model</i>	51
2. Pemilihan Model Estimasi Data Panel	52
a. Uji <i>Chow(Likelihood Ratio)</i>	52
b. Uji Hausman	52
c. Uji LM (<i>Logrange Multiplier</i>)	53
3. Uji Asumsi Klasik	54
a. Statistik	54
b. Uji Normalitas	54
c. Uji Multikolinieritas	54
d. Uji Autokorelasi	55
e. Uji Heteroskedasitas	55
4. Uji Hipotesis	56
a. Uji Parsial (Uji t)	56
b. Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	57
c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)	57
5. Analisis Regresi Berganda	58

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara	59
1. Sejarah Provinsi Sumatera Utara	59
2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara	60
a. Visi Provinsi Sumatera Utara	60
b. Misi Provinsi Sumatera Utara	61
B. Deskripsi Data Penelitian	62
1. Deskripsi penerimaan pajak daerah	62
2. Deskripsi retribusi daerah	64

3. Deskripsi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	66
C. Analisis Data Penelitian	67
1. Uji Estimasi Data Panel	67
2. Pemilihan Model Estimasi Data Panel	68
a. Uji Chow	68
b. Uji Hausman	69
c. Uji LM (Logrange Multiplier)	70
3. Uji Asumsi Klasik	72
a. Statistik Deskriptif	72
b. Uji Normalitas	73
c. Uji Multikolinieritas	74
d. Uji Autokorelasi	75
e. Uji Heteroskedasitas	76
4. Uji Hipotesis	77
a. Uji Parsial (Uji t)	77
b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)	78
c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)	79
5. Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda	80
D. Pembahasan Hasil Penelitian	82
E. Keterbatasan Penelitian	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2018	2
Tabel I.2	Definisi Operasional Variabel	8
Tabel II.1	Daftar Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel III.1	Nama-Nama Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	45
Tabel III.2	Kriteria Pemilihan Sampel.....	46
Tabel III.3	Daftar Sampel Penelitian.....	47
Tabel IV.1	Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara 2015-2018.....	62
Tabel IV.2	Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2015-2018.....	64
Tabel IV.3	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2015-2018.....	66
Tabel IV.4	Uji Model Estimasi	65
Tabel IV.5	Hasil Uji Chow	69
Tabel IV.6	Hasil Uji Hausman	70
Tabel IV.7	Hasil Uji Lagrange Multiplier	71
Tabel IV.8	Hasil Uji Deskriptif	72
Tabel IV.9	Hasil Uji Multikolinearitas	74
Tabel IV.10	Hasil Uji Autokorelasi	75
Tabel IV.11	Hasil Uji Heteroskedasitas	76
Tabel IV.12	Hasil Uji Parsial	77
Tabel IV.13	Hasil Uji Signifikan Simultan	78
Tabel IV.14	Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi	80
Tabel IV.15	Tabel Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pikir Penelitian	42
Gambar IV.1	Uji Normalitas	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah mendapatkan sumber keuangan daerahnya yang diatur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu dari sumber keuangan daerah ialah pemasukan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹

Sumber-sumber PAD adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.² Berdasarkan Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 1 ayat (18) menjelaskan bahwa:

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Lebih lanjut disebutkan dalam penjelasannya, bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.³

¹Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 111.

²*Ibid.*, hal. 14.

³Arief Himmawan dan Djoko Wahjudi, "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta)", dalam *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Volume 21, No. 2, September 2014, hal. 191.

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi yang beribukota di Medan terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota. Jika dilihat dari potensi perekonomian baik dari sektor pertanian, perkebunan, maupun hasil laut serta sektor-sektor lainnya Provinsi Sumatera Utara dapat menghasilkan pendapatan daerah yang cukup tinggi. Selama kurun waktu 2015-2018, terlihat bahwa kinerja PAD Sumatera Utara mulai berjalan di jalan yang benar. Namun setiap tahunnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak sama kontribusi pengaruhnya terhadap PAD. Sehingga menyebabkan PAD Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi mulai dari tahun 2015-2018. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel I.1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2018⁴
(Dalam Ribu Rupiah)

No.	Nama Kabupaten /Kota	2015	2016	2017	2018
Kabupaten					
1.	Tapanuli Selatan	98.438.746	90.666.249	81.435.847	110.678.075
2.	Dairi	60.481.900	75.647.999	66.344.330	101.426.328
3.	Deli Serdang	630.720.702	672.229.015	662.615.775	1.000.927.060
4.	Nias Selatan	50.640.920	14.110.807	14.160.411	21.079.237
5.	Samosir	26.595.698	30.786.029	73.255.677	54.289.358
6.	Nias Utara	30.000.000	28.000.000	32.005.000	71.897.203
Kota					
7.	Pematang Siantar	130.134.852	111.207.722	118.148.890	128.188.367
8.	Gunung Sitoli	34.400.000	28.000.000	34.937.400	36.676.263

⁴ BPS diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota ada yang mengalami fluktuasi mulai dari tahun 2015-2018 seperti pada Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2015 PAD yang diperoleh sebesar Rp. 98.438.756 kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp. 90.666.249 dan pada tahun 2017 menurun lagi menjadi Rp 81.435.847 namun pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi Rp. 110.678.075. Begitu juga dengan kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Nias Utara. Sedangkan adapun kota yang mengalami fluktuasi pada PAD Sumatera Utara adalah Kota Pematangsiantar dan Kota Gunungsitoli.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berhubungan positif dengan PAD. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang meningkat akan meningkatkan PAD. Pada tahun 2015-2018 Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tetapi tidak diikuti dengan peningkatan PAD. Alasan berfluktuasinya PAD disebabkan oleh penurunan tarif bea keluar, dimana tarif bea keluar ini merupakan pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean tidak mencapai target. Dengan pengelolaan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti.⁵

⁵Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hal. 8.

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.⁶

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan PAD. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁷

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam penggalan sumber-sumber pajak daerah ialah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.⁸ Sama hal dengan Provinsi Sumatera Utara yaitu penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2015-2018 mengalami fluktuasi.

Adapun fenomena yang terjadi adalah peningkatan penerimaan pajak daerah tidak selalu diiringi dengan penurunan retribusi daerah. Pada Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2015 pendapatan asli daerah yang diperoleh sebesar Rp. 98.438.746, penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 24.315.707 dan retribusi

⁶Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 384.

⁷*Ibid.*, hal. 386.

⁸Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hal. 87.

daerah sebesar Rp. 8.274.492. Pada tahun 2016 PAD Tapanauli Selatan menurun menjadi Rp. 90.666.249 diiringi dengan kenaikan penerimaan pajak daerah menjadi Rp. 27.940.052 namun penerimaan retribusi daerah mengalami penerimaan jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu Rp. 8.274.492. Selanjutnya pada tahun 2017 PAD yang diperoleh mengalami penurunan lagi menjadi Rp. 81.435.847 diiringi dengan penurunan penerimaan pajak daerah menjadi Rp. 17.370.629 namun pada retribusi daerah mengalami kenaikan menjadi Rp. 8.905.927. Kemudian pada tahun 2018 PAD mengalami kenaikan kembali menjadi Rp. 110.008.075 diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak daerah menjadi Rp. 19.536.571 dan kenaikan retribusi daerah menjadi Rp. 16.870.044. Fenomena yang sama juga terjadi pada Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Nias Utara Kota Pematangsiantar, dan Kota Gunungsitoli.

Naik atau turunnya pertumbuhan pendapatan asli daerah, sangat dipengaruhi oleh jumlah dan jenis pajak, retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah dan kurang insentifnya aparat pengelola dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. Jika jumlah jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut semakin banyak, maka akibatnya pendapatan asli daerah akan semakin tinggi. Walaupun dalam prakteknya, peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tidak hanya diperoleh dari pajak dan retribusi daerah, tetapi juga diperoleh dari pos-pos bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD), penerimaan dinas pendapatan daerah dan penerimaan dari

pemerintah, tetapi penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah menjadi indikator utama.⁹

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal dan Widhi Sunardika bahwa:

Dari hasil analisis uji pengaruh parsial antara penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan variabel pajak daerah mempunyai hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan. Variabel retribusi daerah mempunyai hubungan tidak searah yang lemah dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Secara simultan, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.¹⁰

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Novriyanti Jambak menjelaskan bahwa:

Secara parsial pajak daerah memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $5.058862 > 1.996008$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah memiliki pengaruh terhadap PAD. Secara parsial retribusi daerah juga berpengaruh terhadap PAD sebagaimana hasil yang diperoleh yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $6.099762 > 1.996008$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap PAD. Secara simultan pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD pada tujuh kota di Provinsi Sumatera Utara adapun besar pengaruhnya yaitu 92,5 persen.¹¹

Adapun penelitian yang dilakukan Mardani Nursali bahwa:

Terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat pengaruh

⁹Hibzon, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan", dalam *Jurnal Ekono Pembangunan*, hal. 115.

¹⁰Muhammad Iqbal dan Widhi Sunardika, "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009-2015)", dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Volume 9, No.1, April, 2018, hal. 32-33.

¹¹Novriyanti Jambak, "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2014", (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2016), hal. 92.

penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.¹²

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD menunjukkan hasil yang beragam, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2018”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Terjadi fluktuasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018.
2. Peningkatan pendapatan asli daerah tidak selalu diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak daerah.
3. Peningkatan pendapatan asli daerah lebih sering diiringi dengan peningkatan retribusi daerah.
4. Penurunan pendapatan asli daerah tidak selalu diiringi dengan penurunan penerimaan pajak daerah.
5. Penurunan pendapatan asli daerah lebih sering diiringi dengan penurunan retribusi daerah.

¹²Mardani Nursali, “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan “, dalam *Skripsi*, 2017 (<http://repository.um-palembang.ac.id/id/aprint/451>, diakses 27 Mei 2019 pukul 13:47 WIB).

C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti baik dari segi waktu, biaya, kemampuan, serta keterbatasan referensi maka penulis melakukan pembatasan masalah yang akan diteliti. Peneliti membatasi masalah yang akan disajikan dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada pembahasan pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2018. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel-variabel terikat, yakni Penerimaan Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2). Sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y).

D. Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari kesalahpahaman penelitian ini, terdapat istilah yang digunakan dalam sebuah penelitian, sehingga dibuatlah definisi operasional variabel untuk menjelaskan istilah yang dipakai dalam penelitian pada tabel sebagai berikut.

Tabel I.2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator Variabel	Skala Pengukuran
Penerimaan Pajak Daerah (X_1)	Penerimaan pajak daerah merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik pada pemerintah provinsi	1. Pajak provinsi 2. Pajak kabupaten. ¹⁴	Rasio

	maupun pemerintah kota/kabupaten. ¹³ Maka penerimaan yang dimaksud adalah penerimaan pajak daerah yang diperoleh Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018.		
Retribusi Daerah (X ₂)	Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. ¹⁵ Maka retribusi daerah yang dimaksud adalah semua hasil pungutan yang diperoleh Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018 atas pembayaran yang dilakukan oleh orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa daerah.	1. Retribusi jasa umum 2. Retribusi jasa usaha 3. Retribusi perizinan tertentu. ¹⁶	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ¹⁷ Maka pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan yang diperoleh Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018 yang digunakan dalam pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara.	1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil pengelolaan kakayaan daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah. ¹⁸	Rasio

¹⁴*Ibid.*, hal. 15.

¹³Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2002 hal.14.

¹⁵Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hal. 74.

¹⁶Liberty Pandiangan, *Op. Cit.*, hal. 417.

¹⁷Muhammad Iqbal dan Widhi Sunardika, *Op. Cit.*, hal. 11.

¹⁸*Ibid.*, hal. 14.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018?
2. Apakah terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018.

G. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dalam bidang pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018.

2. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk mengambil bahan kebijakan dalam mengawasi dan meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018.

3. Bagi Pihak Kampus

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan keilmuan dan untuk kemajuan pendidikan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan. Serta sebagai referensi tambahan bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan penelitian yang sama dapat menjadi bahan rujukan serta kajian yang lebih komprehensif.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini ialah:

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi tentang hal-hal yang menjadi alasan melatarbelakangi munculnya judul penelitian, identifikasi masalah yang menjelaskan seluruh aspek yang berhubungan dengan masalah dalam objek

penelitian, batasan masalah yang membatasi ruang lingkup permasalahan, definisi operasional variabel, penelitian mendefinisikan variabel yang digunakan dalam penelitian, selanjutnya rumusan masalah, peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II LANDASAN TEORI, yang memuat tentang teori atau konsep yang dapat mendukung masalah yang dikaji, teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yakni membahas tentang teori-teori penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah, penelitian terdahulu, kerangka pikir, serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian berdasarkan hasil kajian teori.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, di dalamnya terdiri dari lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data, dan analisis data. Lokasi dan waktu penelitian yaitu uraian yang menjelaskan penelitian yang dimulai dari awal penulisan proposal hingga penulisan laporan penelitian yang akan dilaksanakan dan karakteristiknya serta menjelaskan pendekatan yang dilakukan, yakni kuantitatif. Populasi dan sampel yaitu ada hubungannya dengan generalisasi. Namun bila jumlah populasinya besar, dapat ditetapkan sampel sesuai dengan aturan yang ada dalam metodologi penelitian. Jenis dan sumber data menjelaskan jenis data yang digunakan dan sumber data yang digunakan. Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan bentuk sumber data dan jenis pendekatan penelitian. Untuk penelitian dokumentasi, pengumpulan

datanya dilakukan dengan menelaah buku-buku atau arsip yang ada dan bahan lainnya yang menjadi sumber data.

BAB IV, HASIL PENELITIAN menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang akan dilakukan peneliti, selanjutnya peneliti membuat deskriptif variabel penelitian yaitu agar lebih jelas peneliti memberikan gambaran berupa tabel yang akan membuat perkembangan masing-masing variabel. Selanjutnya menjabarkan hasil analisis data yang diolah dengan bantuan program Eviews versi 9 setelah itu peneliti membahas hasil penelitian yang telah diolah menggunakan Eviews versi 9.

BAB V, PENUTUP yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam penutup adalah membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini setelah menganalisis data dan memperoleh hasil dari penelitian ini. Hal ini merupakan langkah akhir dari penelitian dengan membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Arah pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mobilisasi sumber-sumber PAD.¹⁹

Menurut Mardiasmo, dalam jurnal Puja Rizqy Ramadhan menyatakan bahwa “Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas: pajak

¹⁹Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hal. 8.

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: “pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah”.²⁰

Berdasarkan definisi di atas pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah memiliki karakteristik yang sama. Maka dari itu penulis menarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah segala penerimaan daerah setempat yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karena itu, kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD. Semakin besar kontribusi yang dapat diberikan terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat sehingga otonomi daerah dapat terwujud.²¹

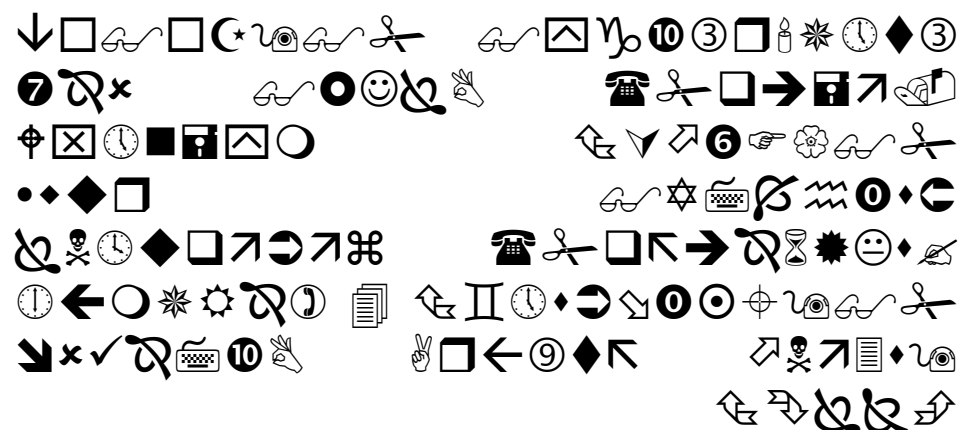
Pada era otonomi daerah sekarang ini daerah dituntut untuk lebih mandiri, baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam

²⁰Puja Rizqy Ramadhan, “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”, dalam *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, No. 5, Mei, 2019, hal. 83.

²¹Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hal. 12.

mendanai keuangan daerahnya. Setiap daerah harus mampu mengelolah dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk menjunjung keberhasilan otonomi daerah, diantaranya: sumber daya manusia (SDM), pengelolaan sumber daya alam, kemampuan mengelolah keuangan daerah, kondisi sosial budaya masyarakat, dan kemampuan manajemen.

Untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah tersebut maka peran masyarakat sangat dibutuhkan. Berkaitan dengan hal tersebut Allah SWT telah menyuruh manusia harus berkelakuan baik, seperti halnya yang tertuang dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168:



Artinya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.²²

Berdasarkan ayat di atas Rasyid Abdul Mun'im Ar-Raja dalam buku yang berjudul Tafsir Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun

²²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 25.

mengenai suatu kaum yang terdiri dari Bani Saqif, Bani Amir bin Sa'sa'ah, Khuza'ah, dan Bani Mudli. Mereka mengharamkan menurut kemauan mereka sendiri memakan beberapa jenis binatang seperti *bahirah* yaitu unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu dibelah telinganya, dan *wasilah* yaitu domba yang beranak dua ekor, satu jantan dan satu betina, lalu anak yang jantan tidak boleh dimakan dan harus diserahkan kepada berhala. Padahal Allah tidak mengharamkan memakan jenis binatang itu, bahkan Allah telah menjelaskan apa-apa yang diharamkan memakan-Nya dalam Al-qur'an.²³

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Allah telah menentukan apa saja makanan yang dihalalkan dan apa saja makanan yang diharamkan. Oleh karena itu kita sebagai warga negara Indonesia dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah maka kita harus mampu mengelolah dan mengembangkan potensi yang kita miliki untuk menjunjung keberhasilan otonomi daerah dengan cara yang benar (halal) dan tidak mengikuti perbuatan syaitan yaitu dengan cara menghalalkan semua cara meskipun itu dilarang oleh Allah SWT.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, diperlukan intensifikasi subjek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek, kegiatan yang paling mudah dilakukan ialah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah

²³Rasyid Abdul Mun'im Ar-Raja, *Tafsir Ibnu Abbas* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hal. 112-113.

yang sudah ada, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses, dan waktu yang panjang.²⁴

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu wujud dari desentralisasi fiskal, untuk memberikan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya. Sumber-sumber PAD adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.²⁵ Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 yaitu:

1) Hasil dari Pajak Daerah

Yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan.

2) Hasil Retribusi Daerah

²⁴*Ibid.*, hal. 99-100.

²⁵*Ibid.*, hal. 14.

Yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Yaitu pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.²⁶

c. Komponen Kebijakan Fiskal Islam Pada Masa Rasulullah SAW

Ada tiga komponen kebijakan fiskal Islam pada masa Rasulullah SAW, yaitu:

1) Dari Kaum Muslim

a) Zakat

Yaitu sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.

b) Zakat Fitrah

Yaitu zakat yang ditunaikan untuk satu jiwa dan diwajibkan pada setiap bulan ramadhan dengan ukuran yang telah ditentukan.

c) *Ushr*

Yaitu jenis pajak bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun serta hanya berlaku terhadap barang-barang yang bernilai lebih dari 200

²⁶Mesra, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara", dalam *Jurnal Manajemen Tools*, Volume 8, No. 2, Desember, 2017, hal. 46-47.

dirham. Tingkat bea yang dikenakan kepada para pedagang muslim sebesar 2,5%.

d) *Amwal Fadhila*

Yaitu harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seseorang muslim yang meninggalkan negerinya.

e) Wakaf

Yaitu harta benda yang didedikasikan kepada kaum muslimin yang disebabkan karena Allah dan pendapatannya akan didepositokan di Baitul Mal.

f) *Nawaib*

Yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat (pernah terjadi pada masa perang tabuk).

g) Shadaqoh Yang Lain

Yaitu pembuktian keimanan yang diwujudkan dengan bentuk pengorbanan materi. Sumber pemasukan pendapatan shodaqoh dari kaum muslimin ialah qurban dan *khafarat*.

2) Dari Non Muslim

a) *Jizyah*

yaitu pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk dari orang yang bukan muslim kepada pemerintah Islam. Jizyah dimaksudkan sebagai loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi dari perlindungan yang diberikan pemerintah Islam untuk mereka.

b) *Kharaj*

Yaitu pajak atas tanah atau hasil tanah. Diambil dari tanah orang yang bukan muslim yang sudah ditaklukkan dan tanah tersebut sudah diambil oleh orang muslim.

3) Masyarakat Umum

a) *Ghanimah*

Yaitu harta rampasan perang yang diperoleh umat Islam dari kemenangan melawan orang kafir.

b) *Fay'i*

Yaitu harta yang didapatkan dari musuh tanpa berperang seperti harta yang tidak bergerak (tanah) atau merupakan harta yang diperoleh dari Islam secara tunai.

c) Uang Tebusan

Yaitu uang untuk tawanan perang, hanya dalam kasus perang Badar pada perang lain tidak sebutkan jumlah uang tebusan tahanan perang.

d) Pinjaman dari Muslim/Non Muslim

Yaitu pinjaman untuk pembayaran tebusan pembebasan kaum muslimin.

e) Hadiah dari Pemimpin atau Pemerintah Negara Lain.²⁷

2. Penerimaan Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah ditelusuri dari beberapa ahli, seperti Rochmat Sumitro yang merumuskan: “Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti provinsi, kotapraja, kabupaten, dan sebagainya”. Sedangkan, Siagian merumuskannya sebagai: “Pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang”.

Definisi yang dikemukakan oleh Josep Riwu Kaho mengenai pajak daerah adalah: “Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public investment*”. Berbeda dengan pandangan Yasin, menurutnya: “Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik, dalam rangka membiayai rumah tangganya”. Dengan kata lain, pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Davey, pajak daerah ialah:

²⁷ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal. 203-205,

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerahnya sendiri, pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah, pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi pungutannya dibagihasilkan kepada pemerintah daerah.²⁸

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.

b. Fungsi Pajak Daerah

Pemerintahan daerah dalam melakukan pungutan harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Fungsi *Budgeteir* (Anggaran)

Disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi *budgeteir* ialah fungsi pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *regulerend* merupakan fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya

²⁸Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hal. 57.

di luar bidang keuangan. Dengan kata lain, pajak digunakan sebagai alat kebijakan dalam mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, untuk mendorong investasi, dan sebagai alat redistribusi (misalnya mengadakan perubahan tarif).

3) Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi ialah fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

4) Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi ialah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.²⁹

c. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi terdiri dari:

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air

Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik yang berfungsi

²⁹*Ibid.*, hal. 49-50.

untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. Sedangkan kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air

Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau

badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Air bawah permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.³⁰

Adapun jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

1) Pajak Hotel

Yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

2) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*.

3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan merupakan semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton

³⁰Liberty Pandiangan, *Op. Cit.*, hal. 387-388.

atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

4) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan atau menganjurkan suatu barang atau jasa untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh pemerintah.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.³¹

d. Tarif Pajak Daerah

Adapun ketentuan mengenai tarif pajak daerah ialah sebagai berikut:

- 1) Tarif pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5% (lima persen).
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 10% (sepuluh persen).
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5% (lima persen).
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 20% (dua puluh persen).
- 5) Pajak hotel sebesar 10% (sepuluh persen).
- 6) Pajak restoran 10% (sepuluh persen).
- 7) Pajak hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- 8) Pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- 9) Pajak penerangan jalan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 10) Pajak pengambilan galian golongan C sebesar 20% (dua puluh persen).
- 11) Pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen).³²

³¹*Ibid.*, hal. 388-389.

³²Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), hal.

3. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun badan.³³ Menurut Rohmat Sumitro dalam buku Adrian Sutedi,

Retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁴

Dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada daerah yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa daerah, atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik yang secara langsung yang dapat ditunjuk.

Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh Pemda senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat sehingga keeluasaan retribusi terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.

³³Muhammad Zain dan Suryo Hermana, *Himpunan Undang-Undang Perpajakan 2010* (Jakarta: PT Indeks, 2010), hal. 319.

³⁴Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hal. 74.

b. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak, bukan retribusi jasa usaha, dan bukan retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan pemda dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
- c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi, maksudnya pengenaan retribusi atas jasa tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan.
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut mencapai tingkat kualitas pelayanan yang lebih baik.

Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

- a) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
- b) Retribusi pelayanan pemakaman.
- c) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- d) Retribusi pelayanan pasar.
- e) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- f) Retribusi pemisahan alat pemadam kebakaran.
- g) Retribusi penggantian biaya cetak peta.
- h) Retribusi pengujian kapal perikanan.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak, bukan retribusi jasa umum, atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasi daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah

- b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi terminal
- e) Retribusi tempat khusus parkir
- f) Retribusi tempat penginapan
- g) Retribusi rumah potong hewan
- h) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- j) Retribusi pengolahan limbah cair
- k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemda dalam rangka asas desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004.
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dan pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan
- b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c) Retribusi izin gangguan
- d) Retribusi izin trayek³⁵

c. Tata Cara Perhitungan Retribusi Daerah

Adapun tata cara perhitungan retribusi daerah terdapat pada pasal 151, yaitu sebagai berikut:

- a) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- b) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- c) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- d) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

³⁵Mardiasmo, *Op. Cit.*, hal. 15-16.

- e) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- f) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.³⁶

d. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Ada beberapa prinsip dan sasaran yang digunakan dalam penetapan tarif retribusi daerah, yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum

Untuk retribusi jasa umum ditetapkan pada pasal 152 ayat 1 sampai dengan ayat 4, yaitu sebagai berikut:

- a) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- b) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- c) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

³⁶Muhammad Zain dan Suryo Hermana, *Op. Cit.*, hal. 398.

- d) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan retribusi penggantian biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

2) Retribusi Jasa Usaha

Untuk retribusi jasa usaha ditetapkan pada pasal 153 ayat 1 dan ayat 2, yaitu sebagai berikut:

- a) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- b) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Untuk retribusi perizinan tertentu ditetapkan pada pasal 154 ayat 1 dan ayat 2, yaitu sebagai berikut:

- a) Prinsip dan sarasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- b) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di

lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.³⁷

4. Hubungan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, kebijakan intensifikasi pajak selalu berada dalam kontrol publik. Karena fungsi yang sangat strategis dan prosesnya yang memungkinkan ada kontrol publik, maka intensifikasi pendapatan dari sektor pajak merupakan langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.³⁸

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa adanya hubungan antara penerimaan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu jika jumlah penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan maka pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan.

5. Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan pemda yang penting lainnya ialah retribusi daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran kepada daerah yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa daerah,

³⁷*Ibid.*, hal. 398-399.

³⁸Mardiasmo, *Op. Cit.*, hal. 6.

atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik yang secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomi karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, maka dia tidak dikenakan iuran itu.³⁹

Daerah mempunyai kewenangan dalam memungut semua jenis retribusi daerahnya. Peran serta masyarakat dalam membayar retribusi sangat diharapkan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, adanya hubungan antara retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu jika jumlah penerimaan retribusi daerah mengalami kenaikan maka pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sebelumnya yang relevan dan menjadi rujukan bagi landasan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Beta Asteria (Jurnal Riset Manajemen, Prodi Manajemen, STIE Widya Wiwaha, 2015)	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli	Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah. Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan

³⁹*Ibid.*, hal. 83-84.

		Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah.
2.	Muhammad Iqbal dan Widhi Sunardika, (Jurnal Ilmiah Akuntansi, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi, Universitas Bale Bandung, 2018)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009-2015)	Dari hasil analisis uji pengaruh parsial antara penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan variabel pajak daerah mempunyai hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan dengan dibuktikan oleh nilai t hitung untuk variabel penerimaan pajak daerah lebih besar dari pada t tabel ($t_{hitung} > t_{tabel}$). Variabel retribusi daerah mempunyai hubungan tidak searah yang lemah dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Secara simultan, variabel bebas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan variabel terikat.
3.	Novriyanti Jambak (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Padangsidimpuan, 2016)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara 2005-2014	Secara parsial pajak daerah memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $5.058862 > 1.996008$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah memiliki pengaruh terhadap PAD. Secara parsial retribusi daerah juga berpengaruh terhadap PAD sebagaimana hasil yang diperoleh yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $6.099762 > 1.996008$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap PAD. Secara simultan pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD pada tujuh kota di Provinsi Sumatera Utara adapun besar pengaruhnya yaitu 92,5 persen.
4.	Mardani Nursali (Skripsi,	Pengaruh Penerimaan	Terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017)	Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
5.	Md. Krisna Arta Anggar Kusuma dan Ni Gst. Putu Wirawati(Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana (Unud), Bali)	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali	Hasil statistik menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah lebih dominan kontribusinya dalam peningkatan PAD Provinsi Bali yakni sebesar 84,9% sedangkan untuk retribusi daerah hanya 16,6% kontribusinya terhadap PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan tabel di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Beta Asteria yaitu sama-sama meneliti pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi yang diteliti. Beta Asteria meneliti Di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal dan Widhi Sunardika, yaitu sama-sama meneliti pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap

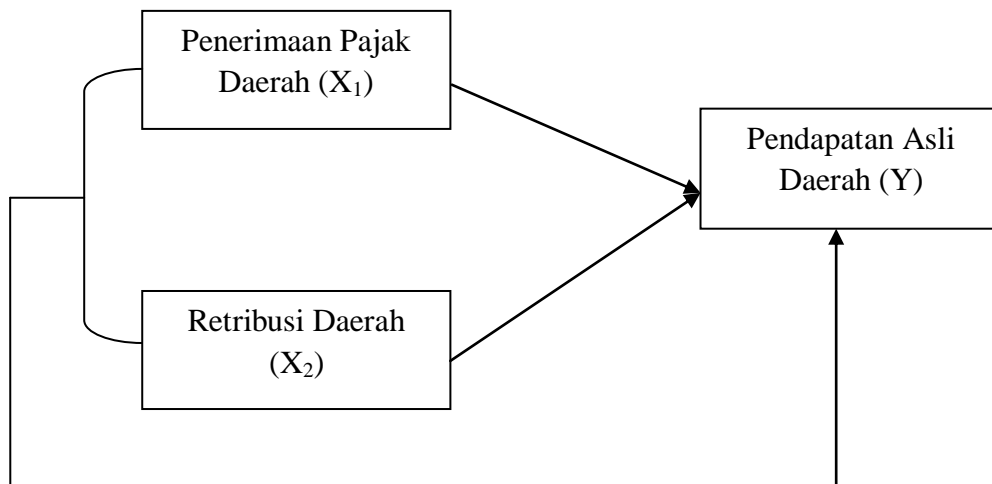
pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi yang diteliti. Muhammad Iqbal dan Widhi Sunardika, meneliti Kabupaten Bandung, sedangkan dalam penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Utara.

3. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novriyanti Jambak yaitu sama-sama meneliti pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada periode yang diteliti. Novriyanti Jambak meneliti pada periode 2005-2014. Sedangkan dalam penelitian ini pada periode 2015-2018.
4. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mardani Nursali, yaitu sama-sama meneliti pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi yang diteliti. Mardani Nursali, meneliti Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan dalam penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Utara.
5. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Md. Krisna Arta Anggar Kusuma dan Ni Gst. Putu Wirawati yaitu sama-sama meneliti pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi yang diteliti. Md. Krisna Arta Anggar Kusuma dan Ni Gst. Putu Wirawati, meneliti Kabupaten/Kota Provinsi Bali, sedangkan dalam penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Utara.

C. Kerangka Pikir

Dalam penelitian yang berjudul pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018, dapat digambarkan kerangka pikir sebagai berikut.

Gambar II.1
Kerangka Pikir Penelitian



Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa secara parsial penerimaan pajak daerah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah dan secara parsial retribusi daerah juga dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Kemudian secara simultan juga terlihat bahwa penerimaan pajak daerah (variabel X₁) dan retribusi daerah (variabel X₂) dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah (variabel Y) Provinsi Sumatera Utara. Dengan kata lain semakin tinggi jumlah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah maka akan semakin tinggi juga pendapatan asli daerah yang diperoleh Provinsi Sumatera Utara.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pendapat, jawaban atau dugaan yang bersifat sementara dari suatu permasalahan yang diajukan, yang kebenarannya masih perlu dibuktikan lebih lanjut. Menurut Suharismi Arikunto hipotesis adalah “Jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul”.⁴⁰

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah dugaan sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian disusun dalam bentuk pertanyaan. Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

- H₁ : Ada pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di delapan Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018.
- H₂ : Ada pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di delapan Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018.
- H₃ : Ada pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di delapan Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018.

⁴⁰Suharismi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 45.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota. Penelitian ini dimulai bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Februari 2020.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah data penelitian yang bekerja dengan angka, yang angkanya berwujud bilangan yang di analisis menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang bersifat spesifik, dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel mempengaruhi variabel lain.⁴¹ Adapun angka dalam penelitian ini ialah data Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota menurut Jenis Pendapatan Provinsi Sumatera Utara periode 2015-2018.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Pengertian populasi adalah himpunan yang lengkap dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya ingin kita ketahui.⁴² Besarnya populasi yang akan dibuat dalam suatu penelitian tergantung pada jangkauan kesimpulan yang akan dibuat atau dihasilkan. Berikut ini nama-

⁴¹Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 13.

⁴²Toha Anggoro, dkk. *Metode Penelitian Edisi 2* (Jakarta: Universitas Terbuka 2008), hal. 42.

nama kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang menjadi populasi penelitian.

Tabel III.1
Nama-Nama Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

No.	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Asahan
2.	Kabupaten Batu Bara
3.	Kabupaten Dairi
4.	Kabupaten Deli Serdang
5.	Kabupaten Humbang Hasundutan
6.	Kabupaten Karo
7.	Kabupaten Labuhanbatu
8.	Kabupaten Labuhanbatu Selatan
9.	Kabupaten Labuhanbatu Utara
10.	Kabupaten Langkat
11.	Kabupaten Mandailing Natal
12.	Kabupaten Nias
13.	Kabupaten Nias Bharat
14.	Kabupaten Nias Selatan
15.	Kabupaten Nias Utara
16.	Kabupaten Padang Lawas
17.	Kabupaten Padang Lawas Utara
18.	Kabupaten Pakpak Barat
19.	Kabupaten Samosir
20.	Kabupaten Serdang Bedagai
21.	Kabupaten Simalungun
22.	Kabupaten Tapanuli Selatan
23.	Kabupaten Tapanuli Tengah
24.	Kabupaten Tapanuli Utara

25.	Kabupaten Toba Samosir
26.	Kota Binjai
27.	Kota Gunungsitoli
28.	Kota Medan
29.	Kota Padangsidempuan
30.	Kota Pematangsiantar
31.	Kota Sibolga
32.	Kota Tanjung Balai
33.	Kota Tebing Tinggi

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁴³ Pemilihan sampel pada penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* yang mana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴⁴ Adapun pertimbangan yang digunakan dalam penentuan pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.2
Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Kabupaten yang terdapat di provinsi Sumatera Utara 2015-2018	25
2.	Kabupaten yang mengalami fluktuasi pada Pendapatan Asli Daerah di provinsi Sumatera Utara 2015-2018	6
3.	Kabupaten yang tidak mengalami fluktuasi pada Pendapatan Asli Daerah	19

⁴³Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 12.

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 62.

	di provinsi Sumatera Utara 2015-2018	
4.	Kota yang terdapat di provinsi Sumatera Utara 2015-2018	8
5.	Kota yang mengalami fluktuasi pada Pendapatan Asli Daerah di provinsi Sumatera Utara 2015-2018	2
6.	Kota yang tidak mengalami fluktuasi pada Pendapatan Asli Daerah di provinsi Sumatera Utara 2015-2018	6
7.	Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara yang dijadikan sampel	8

Berdasarkan tabel III.2 di atas, maka dapat diperoleh sampel penelitian yang memenuhi kriteria terdiri dari 6 Kabupaten dan 2 Kota dengan nama kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel III.3
Daftar Sampel Penelitian

No.	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Tapanuli Selatan
2.	Kabupaten Dairi
3.	Kabupaten Deli Serdang
4.	Kabupaten Nias Selatan
5.	Kabupaten Samosir
6.	Kabupaten Nias Utara
7.	Kota Pematangsiantar
8.	Kota Gunungsitoli

Sampel dalam penelitian ini adalah data Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota menurut Jenis Pendapatan Provinsi Sumatera Utara periode 2015-2018 yang dipublikasikan oleh website resmi Badan Pusat Statistik. Penelitian ini dalam kurun waktu 2015-2018 = 4 (empat) tahun.

Sehingga sampel penelitian adalah 8 kabupaten/kota X 4 (empat) tahun = 32 sampel penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel adalah data yang bersifat *time series* dan *cross section*, sehingga terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode.⁴⁵ Sedangkan sumber data penelitian dapat diklasifikasikan menjadi sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diolah oleh pihak pertama. Data diperoleh melalui publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan adalah realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018. Data tersebut terdiri dari data Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang di butuhkan dalam menguji hipotesis di perlukan suatu instrumen atau teknik penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto teknik penelitian ini merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik diolah.⁴⁶ Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁵Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi 4* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hal. 2.

⁴⁶Nur Asnawi dan Masyhuti, *Metode Manajemen Pemasaran* (Malang: UIN. Maliki Pres, 2011), hal.155.

1. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan yang digunakan bersumber dari jurnal, skripsi, dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian namun memperoleh data melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dokumen adalah data-data yang tersedia dan sebelumnya telah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota menurut Jenis Pendapatan Provinsi Sumatera Utara periode 2015-2018. Untuk mengukur pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara maka data yang diperlukan yaitu:

a. Penerimaan Pajak Daerah (X_1)

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar untuk setiap jenis pajak pusat.

$$X_1 = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

b. Retribusi Daerah (X_2)

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan

demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

$$X_2 = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

c. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Rumus menghitung Pendapatan Asli Daerah ialah:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Perusahaan Milik Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah}$$

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan lapangan selama proses penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui Eviews versi 9. Adapun teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut:

1. Uji Estimasi Data Panel

Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat beberapa metode yang ditawarkan, yaitu:

a. *Common Effects Model*

Asumsi pertama yang dikenalkan dalam regresi data panel dengan metode *common effects* adalah asumsi yang menganggap bahwa intersep dan slope selalu tetap baik antar waktu maupun antar individu. Setiap individu (n) yang diregersi untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel-variabel independennya adalah sama untuk setiap waktu.⁴⁷

b. *Fixed Effects Model*

Teknik *fixed effects* adalah teknik mengistemasi data panel yang memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah *intercept time series* atau *cross section*. Model dengan *fixed effects* menambahkan variabel *dummy*.⁴⁸

c. *Random Effects Model*

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hasil estimasi pada *fixed effects* menggunakan dua asumsi yang masing-masing menyatakan bahwa slope tetap dan intersep akan berbeda baik karena perbedaan individu maupun perbedaan waktu. Proses estimasi untuk kedua model *fixed effects* tersebut dilakukan dengan menambahkan variabel *dummy* pada model ekonometri, yaitu variabel *dummy* untuk mengakomodasi perbedaan unit data dan perbedaan periode waktu. Pendekatan pada estimasi ini disebut *least square dummy variable*.⁴⁹ Pada model ini,

⁴⁷Jaka Sriyana, *Metode Regresi Data Panel* (Yogyakarta: Ekonisia, 2014), hal. 107.

⁴⁸Shochrul Ajija, dkk. *Cara Cerdas Menguasai Eviews* (Jakarta: Selemba Empat, 2011), hal. 51.

⁴⁹*Ibid.*, hal. 53.

diasumsikan bahwa perbedaan intersep dan konstanta disebabkan oleh residual/error sebagai akibat perbedaan antara unit dan antar periode waktu yang terjadi secara *random*.⁵⁰

2. Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Terdapat tiga uji yang bisa dilakukan untuk menentukan model estimasi yang paling tepat, yaitu uji *Chow* (F) untuk signifikansi *fixed effects*, uji *LM* (*Logrange Multiplier*) untuk signifikansi *random effects* dan uji hausman untuk signifikansi *fixed effects* dan *random effects*.⁵¹

a. Uji *Chow*

Yaitu uji yang digunakan untuk memilih antara model *common effects* atau model *fixed effects*. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 = *common effects model* yang paling sesuai

H_a = *fixed effects model* yang paling sesuai

Dasar dengan pengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai *Chi-Square* tabel.

$Chi-Square_{hitung} > Chi-Square_{tabel}$ = H_0 diterima

$Chi-Square_{hitung} < Chi-Square_{tabel}$ = H_0 ditolak

b. Uji Hausman

Uji selanjutnya dalam menentukan model estimasi terbaik adalah uji hausman. Dalam uji ini model yang akan dibandingkan adalah

⁵⁰*Loc. Cip.*, hal. 153.

⁵¹*Ibid.*, hal 180-181.

random effects dan *fixed effects*. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

H_0 = *Fixed effects model* yang paling sesuai

H_a = *Random effects model* yang paling sesuai

Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai *Chi-Square* hitung dengan *Chi-Square* tabel.

$Chi-Square_{hitung} > Chi-Square_{tabel}$ = H_0 diterima

$Chi-Square_{hitung} < Chi-Square_{tabel}$ = H_0 ditolak

c. Uji LM (*Logrange Multiplier*)

Uji menentukan model estimasi terbaik yang terakhir selanjutnya uji yang dilakukan adalah uji LM (*Lagrange Multiplier*). Uji ini dilakukan untuk membandingkan antara *common effects* dan *random effects*. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

H_0 = *Common effects model* yang paling sesuai

H_a = *Random effects model* yang paling sesuai

Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai *Chi-Square* hitung dengan *Chi-Square* tabel.

$Test Hypotesis-Cressection > \alpha$ = H_0 diterima

$Test Hypotesis-Cressection < \alpha$ = H_0 ditolak

3. Uji Asumsi Klasik

a. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yang digunakan untuk menggambarkan tentang ringkasan-ringkasan data seperti *mean*, standar deviasi, modus dan lain-lain.⁵²

b. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang baik memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Normalitas dapat dideteksi dengan menggunakan JB (*Jarque Bera*), sebelum kita melakukan analisis yang sesungguhnya, data tersebut harus diuji kenormalannya.⁵³ Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan jika nilai-nilai $p > 0,05$ maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan jika $p < 0,05$ maka diinterpretasikan sebagai tidak normal.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk melihat korelasi antara masing-masing variabel bebas. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu multikolinearitas maka dapat diketahui dari nilai korelasi antara dua variabel bebas tersebut. Apabila nilai korelasi kurang dari 0,8 maka

⁵²Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hal. 264.

⁵³Danang Sunyoto, *Dasar-Dasar Ekonomi* (Yogyakarta: Tim Redaksi Caps, 2012), hal.

variabel bebas tersebut tidak memiliki suatu masalah atau persoalan multikolinearitas, begitu juga dengan sebaliknya.⁵⁴

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah:

H_0 = Tidak terdapat autokorelasi

H_a = Terdapat autokorelasi

Dalam penelitian ini uji autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin-Watson (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut⁵⁵:

- 1) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$, maka hipotesis ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- 2) Jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis diterima, yang berarti tidak terjadi autokorelasi.
- 3) Jika d terletak dL maka du atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

e. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila

⁵⁴Achmad Naufal Fachreza, "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Kontruksi di Kabupaten Provinsi Jawa Timur 2011-2015", dalam *Jurnal Ekonomi*, Volume 15, No. 2, Desember 2017.

⁵⁵Setiawan dan Dwi Endah Kusriani, *Ekonometrika* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), hal. 82.

variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi.⁵⁶ Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah:

H_0 = Tidak terdapat heteroskedastisitas

H_a = Terdapat heteroskedastisitas

Pengambilan keputusan dalam uji ini dilihat dari nilai *p-value* dibandingkan dengan nilai *alpha*. Ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$p\text{-value} > \alpha = H_0$ diterima

$p\text{-value} < \alpha = H_0$ ditolak

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (pendapatan asli daerah). Hipotesis yang digunakan dalam uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 = Penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018.

H_2 = Retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018.

H_3 = Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018.

⁵⁶Imam Ghazali dan Dwi Ratmono, *Analisis Multivariat dan Ekonometrika* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), hal. 134.

Uji ini akan membandingkan nilai t_{hitung} yang akan dibandingkan dengan t_{tabel} probabilitas yang akan dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05 dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika nilai probabilitas < nilai signifikan 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 2) Jika nilai probabilitas > nilai signifikan 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh sekelompok variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.⁵⁷

Penetapan hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} dengan ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$F_{hitung} < F_{tabel} = H_0$ diterima

$F_{hitung} > F_{tabel} = H_0$ ditolak

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua variabel independen dengan satu variabel dependen. Dalam penelitian ini nilai koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai *R-squared*.

⁵⁷*Ibid.*, hal. 90.

5. Analisis Regresi Berganda

Regresi berganda digunakan untuk menguji signifikan ada atau tidaknya hubungan lebih dari dua variabel melalui koefisien regresinya.⁵⁸ Model regresi dengan lebih dari satu variabel penjelas, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi variabel tak bebas.⁵⁹ Fungsi persamaan regresi selain untuk memprediksi nilai *dependent variable* (Y), juga dapat digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh *independent variable* (X) terhadap *dependent variable* (Y).

Adapun analisis regresi berganda yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen Penerimaan Pajak Daerah (X₁) dan Retribusi Daerah (X₂) terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (Y) di Provinsi Sumatera Utara. Adapun rumus analisis regresi berganda adalah:

$$PAD = a + b_1 PPD + b_2 RD + e$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

a = Konstanta perpotongan garis pada sumbu X

b₁ b₂ = Koefisien regresi

PPD = Penerimaan Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

e = *Error term*

⁵⁸Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal. 107.

⁵⁹Damodar N dan Gujarati, *Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid Kesatu* (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 180.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara

1. Sejarah Provinsi Sumatera Utara

Sumatera Utara lahir tanggal 15 April 1948 dengan wilayah mencakup tiga keresidenan, yaitu, Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Ibu kotanya waktu itu belum di Medan, melainkan di Kutaraja, sekarang Banda Aceh. Gubernur Sumatera Utara yang pertama dijabat oleh Mr. S.M. Amin. Berdasarkan penemuan arkeologi, Sumatera Utara diketahui dihuni sejak zaman Mesolitikum. Penghuninya disebut sebagai orang Austro Melanesoid, banyak mendiami daerah muara sungai. Pada tahun 2000 SM, Sumatera Utara mulai dihuni oleh orang Proto Melayu dan kemudian dihuni pula oleh orang Deutro Melayu yang berasal dari daerah bagian selatan Cina.⁶⁰

Sumatera Utara merupakan Provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.⁶¹ Provinsi Sumatera Utara pada bulan Desember 2018 terdiri atas 25 Kabupaten dan 8 Kota. Provinsi ini berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain: di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, di sebelah timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, di sebelah

⁶⁰Marulamasina, “Sejarah Sumatera Utara” <https://amp-kaskus-co.id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kaskus.co.id>, diakses 29 Januari 2020 pukul 10.43 WIB.

⁶¹BPS Provinsi Sumatera Utara, *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2018* (Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2018), hal. 3.

selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/kawasan yaitu Pantai Barat, dataran tinggi, dan Pantai Timur. Kawasan Pantai Barat meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga dan Kota Gunungsitoli. Kawasan dataran tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, dan Kota Pematangsiantar. Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjungbalai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai.⁶²

2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara

a. Visi Provinsi Sumatera Utara

Adapun visi dari Provinsi Sumatera Utara ialah:

“Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat”

⁶²*Ibid.*, hal. 1-2.

b. Misi Provinsi Sumatera Utara

Adapun misi dari Provinsi Sumatera Utara ialah:

- 1) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
- 2) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
- 3) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
- 4) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia.
- 5) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

B. Deskripsi Data Penelitian

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari data Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota menurut Jenis Pendapatan Provinsi Sumatera Utara yang diakses melalui *website* resmi BPS Provinsi Sumatera Utara daerah dalam angka. Data yang diakses peneliti yaitu data Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota menurut Jenis Pendapatan Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015-2018 yang akan digunakan untuk mendapatkan jumlah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

1. Deskripsi Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik pada pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten. Adapun data perkembangan penerimaan pajak daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel IV.1
Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara 2015-2018 (ribu rupiah)⁶³

No.	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Jumlah (Rp)
1.	Kabupaten Tapanuli Selatan	2015	24.315.707
		2016	27.940.052
		2017	17.370.629
		2018	19.536.571
2.	Kabupaten Dairi	2015	7.766.000
		2016	8.766.000
		2017	9.266.000
		2018	14.211.500
3.	Kabupaten Deli Serdang	2015	463.126.092
		2016	487.186.468
		2017	484.520.000

⁶³ BPS diolah

		2018	484.520.000
4.	Kabupaten Nias Selatan	2015	15.330.442
		2016	3.932.834
		2017	4.542.498
		2018	5.812.926
5.	Kabupaten Samosir	2015	5.153.000
		2016	6.334.000
		2017	13.130.000
		2018	13.617.042
6.	Kabupaten Nias Utara	2015	6.500.000
		2016	5.900.000
		2017	3.945.000
		2018	3.945.000
7.	Kota Pematangsiantar	2015	33.206.827
		2016	35.715.000
		2017	39.730.000
		2018	40.100.000
8.	Kota Gunungsitoli	2015	9.513.250
		2016	8.274.492
		2017	8.905.927
		2018	16.870.044

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi tiap tahunnya, namun ada juga yang mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya. Adapun kabupaten yang mengalami fluktuasi pada penerimaan pajak daerah seperti pada Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada tahun 2015 penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 24.315.707 kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi Rp. 27.940.05 selanjutnya pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp. 17.370.629 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi Rp. 19.536.571. Begitu juga dengan kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Nias Selatan. Sedangkan adapun kabupaten/kota yang mengalami kenaikan tiap tahunnya seperti pada Kabupaten Dairi yaitu pada tahun 2015 penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 7.766.000 selanjutnya pada tahun 2016 mengalami

kenaikan menjadi Rp. 8.766.000 kemudian pada tahun 2017 menjadi 9.266.000 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan lagi menjadi Rp. 14.211.500. Begitu juga dengan kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Samosir, Kota Pematangsiantar, dan Kota Gunungsitoli. Adapun kabupaten yang mengalami penurunan penerimaan pajak daerah tiap tahunnya ialah Kabupaten Nias Utara yaitu pada tahun 2015 penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 6.500.000 selanjutnya pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp. 5.900.000 kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp. 3.945.000 dan pada tahun 2018 tidak mengalami penurunan dan kenaikan lagi sehingga jumlah penerimaan pajak daerah tetap menjadi Rp. 3.945.000.

2. Deskripsi Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun data perkembangan retribusi daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel IV.2
Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara 2015-2018 (ribu rupiah)⁶⁴

No.	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Jumlah (Rp)
1.	Kabupaten Tapanuli Selatan	2015	8.274.492
		2016	8.274.492
		2017	8.905.927
		2018	16.870.044
2.	Kabupaten Dairi	2015	34.528.145

⁶⁴BPS diolah

		2016	45.717.493
		2017	30.666.560
		2018	49.628.550
3.	Kabupaten Deli Serdang	2015	118.850.165
		2016	124.485.665
		2017	112.795.775
		2018	122.642.060
4.	Kabupaten Nias Selatan	2015	29.686.215
		2016	4.785.675
		2017	3.389.889
		2018	4.537.087
5.	Kabupaten Samosir	2015	10.174.136
		2016	3.433.650
		2017	5.085.880
		2018	7.179.075
6.	Kabupaten Nias Utara	2015	1.500.000
		2016	2.100.000
		2017	1.360.000
		2018	1.360.000
7.	Kota Pematangsiantar	2015	11.533.155
		2016	9.756.178
		2017	7.754.773
		2018	13.299.773
8.	Kota Gunungsitoli	2015	10.900.000
		2016	1.587.000
		2017	4.210.000
		2018	3.050.000

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa retribusi daerah Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi tiap tahunnya, namun ada juga yang mengalami kenaikan tiap tahunnya. Adapun kabupaten/kota yang mengalami fluktuasi pada retribusi daerah seperti pada Kabupaten Dairi yaitu pada tahun 2015 retribusi daerah sebesar Rp. 34.528.145 selanjutnya pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi Rp. 45.717.493 kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp. 30.666.560 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan lagi menjadi Rp. 49.628.550. Begitu juga dengan kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Nias Utara, Kota

Pematangsiantar, dan Kota Gunungsitoli. Adapun kabupaten yang mengalami penurunan retribusi daerah tiap tahunnya ialah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 8.274.492 selanjutnya pada tahun 2016 sebesar Rp. 8.274.492 kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi Rp. 8.905.927 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan lagi menjadi Rp. 16.870.044.

3. Deskripsi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Adapun data perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disajikan dalam tabel berikut:

Tabel IV.3
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2015-2018 (ribu rupiah)⁶⁵

No.	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Jumlah (Rp)
1.	Kabupaten Tapanuli Selatan	2015	98.438.746
		2016	90.666.249
		2017	81.435.847
		2018	110.678.075
2.	Kabupaten Dairi	2015	60.481.900
		2016	75.647.999
		2017	66.344.330
		2018	101.426.328
3.	Kabupaten Deli Serdang	2015	60.481.900
		2016	75.647.999
		2017	66.344.330
		2018	101.426.328
4.	Kabupaten Nias Selatan	2015	50.640.920
		2016	14.110.807
		2017	14.160.411
		2018	21.079.237

⁶⁵BPS diolah

5.	Kabupaten Samosir	2015	26.595.698
		2016	30.786.029
		2017	3.255.677
		2018	54.289.358
6.	Kabupaten Nias Utara	2015	30.000.000
		2016	28.000.000
		2017	32.005.000
		2018	71.897.203
7.	Kota Pematangsiantar	2015	130.134.852
		2016	111.207.722
		2017	118.148.890
		2018	128.188.367
8.	Kota Gunungsitoli	2015	34.400.000
		2016	28.000.000
		2017	34.937.400
		2018	36.676.263

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi tiap tahunnya, seperti pada Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 98.438.746 selanjutnya pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp. 90.666.249 kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan lagi menjadi Rp. 81.435.847 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi Rp. 110.678.075 begitu juga dengan kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Nias Utara, Kota Pematangsiantar, dan Kota Gunungsitoli.

C. Analisis Data Penelitian

1. Uji Estimasi Data Panel

Analisis data panel dapat mempelajari sekelompok subyek jika kita ingin mempertimbangkan baik dimensi individu data maupun dimensi waktu. Hal terpenting dalam melakukan analisis regresi data panel adalah

pemilihan metode estimasi yang digunakan. Sejauh ini terdapat tiga model pendekatan estimasi yang bisa digunakan pada regresi data panel, yaitu pendekatan dengan model *common effects*, *fixed effects*, dan *random effects*.

Ketiga model diatas selanjutnya diuji satu persatu, dibawah ini adalah hasil uji estimasi dari ketiga model tersebut.

Tabel IV.4
Uji Model Estimasi

Model	Vaeriable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Common Effects	C	53.640250	84.19485	6.370966	0.0000
	PENERIMAAN PAJAK DAERAH	-0.085304	0.125366	-0.680442	0.5016
	RETRIBUSI DAERAH	0.574001	0.513360	1.118127	0.2727
Fixed Effects	C	-1.6679019	3.6408558	-0.458107	0.6514
	PENERIMAAN PAJAK DAERAH	0.607161	0.522035	1.163066	0.2573
	RETRIBUSI DAERAH	1.353006	0.447092	3.026240	0.0062
Random Effects	C	45.026744	16.263357	2.768601	0.0097
	PENERIMAAN PAJAK DAERAH	-0.226887	0.134417	-1.687932	0.1022
	RETRIBUSI DAERAH	1.313780	0.419826	3.129342	0.0040

Sumber: Data penelitian diolah, 2020

2. Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Setelah melakukan uji estimasi tabel IV.4 di atas, selanjutnya dipilih model estimasi yang tepat, pemilihan model estimasi yang tepat dilakukan dengan menggunakan uji lainnya, yaitu *uji chow*, *Hausman Test* dan *Uji LM (Lagrange Multiplier)*.

a. Uji Chow

Uji pertama yang dilakukan dalam menentukan model estimasi terbaik adalah *uji chow*. Uji ini dilakukan untuk membandingkan model

common effects dengan *fixed effects*. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

H_0 = *Common effects model* yang paling sesuai

H_a = *Fixed effects model* yang paling sesuai

Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai *chi-square* hitung dengan *chi-square* tabel.

$Chi-Square_{hitung} > Chi-Square_{tabel} = H_0$ diterima

$Chi-Square_{hitung} < Chi-Square_{tabel} = H_0$ ditolak

Tabel IV.5
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FE
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	28.164667	(7,22)	0.0000
Cross-section Chi-square	73.559237	7	0.0000

Sumber: Data penelitian diolah, 2020

Berdasarkan tabel IV.5 *uji chow* di atas, dapat dilihat bahwa nilai *chi-square* yang diperoleh adalah 73,559237 lebih besar dari nilai *chi-square* tabel 14,017, sehingga *chi-square* yang diperoleh lebih besar daripada *chi-square* tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil dari uji ini menyatakan bahwa model yang paling sesuai antara *common effects* dan *fixed effects* adalah *common effects*.

b. *Hausman Test*

Uji selanjutnya dalam menentukan model estimasi terbaik adalah *hausman test*. Dalam uji ini model yang akan dibandingkan adalah

random effects dan *fixed effects*. Hipotesis yang akan digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

$H_0 = \text{Fixed effects model}$ yang paling sesuai

$H_a = \text{Random effects model}$ yang paling sesuai

Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai *chi-square* tabel.

$\text{Chi-Square}_{\text{hitung}} > \text{Chi-Square}_{\text{tabel}} = H_0$ diterima

$\text{Chi-Square}_{\text{hitung}} < \text{Chi-Square}_{\text{tabel}} = H_0$ ditolak

Tabel IV.6
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: RE
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.520809	2	0.1720

Sumber: Data penelitian diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.6 uji hausman di atas, dapat dilihat bahwa nilai *chi-square* yang diperoleh adalah 3,520809 lebih kecil dari nilai *chi-square* tabel 5,591, sehingga *chi-square* yang diperoleh lebih kecil dari pada nilai *chi-square* tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil dari uji ini dapat disimpulkan bahwa model yang paling sesuai antara *random effects* dan *fixed effects* adalah *random effects*.

c. Uji LM (*Lagrange Multiplier*)

Untuk menentukan model terbaik estimasi terakhir, uji selanjutnya yang dilakukan adalah uji LM (*Lagrange Multiplier*), uji ini

dilakukan untuk membandingkan antara *Common Effects* dan *Random Effects*. Hipotesis dalam uji ini adalah sebagai berikut:

H_0 = *Common effects* yang paling sesuai

H_a = *Random effects* yang paling sesuai

Pengambilan keputusan dalam uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai *Test Hypothesis-Cross-section* dengan α , dengan ketentuan sebagai berikut:

Test Hypothesis-Cross-section $> \alpha$ = H_0 diterima

Test Hypothesis-Cross-section $< \alpha$ = H_0 ditolak

Tabel IV.7
Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-Section	Time	Both
Breusch-Pagan	32.68970	0.474116	33.16381
	(0.0000)	(0.4911)	(0.0000)

Sumber: Data penelitian diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai pada *Test Hypothesis-Cross-section* adalah 0,0000 lebih kecil dari α 0,05, yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil uji menyatakan bahwa model yang paling sesuai antara *common effects* dan *random effects* adalah *random effects*. Uji terakhir ini menunjukkan bahwa dari ketiga uji yang telah dilakukan model estimasi yang paling sesuai adalah *random effects*.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yang digunakan untuk menggambarkan tentang ringkasan-ringkasan data seperti *mean*, standar deviasi, modus dan lain-lain.

Tabel IV.8
Hasil Uji Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PENERIMAAN PAJAK DAERAH	32	3.932.834	4.870.008	72.780.728	1.570.008
RETRIBUSI DAERAH	32	1.360.000	1.240.008	25.572.558	38.268.522
valid N (listwise)	32				

Sumber: Data penelitian diolah, 2020

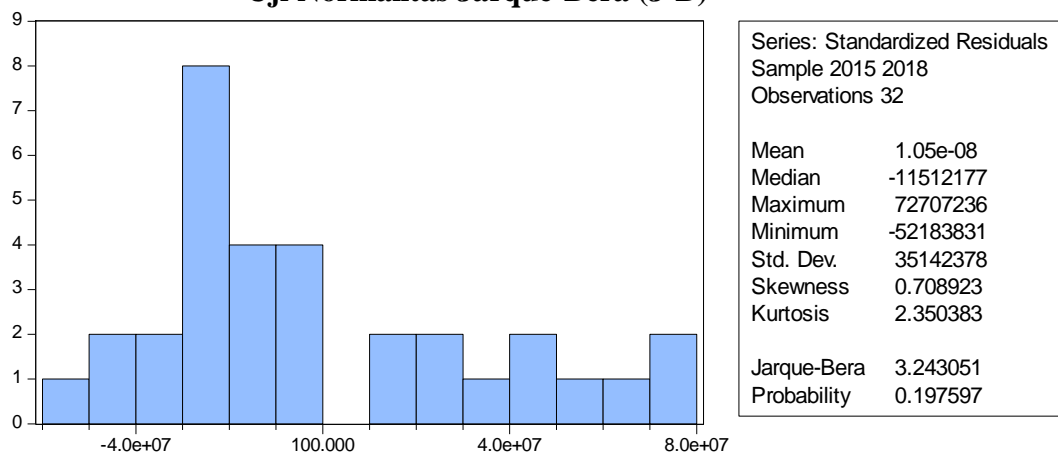
Berdasarkan tabel IV.8 di atas dapat dilihat bahwa variabel penerimaan pajak daerah nilai dari jumlah data (N) adalah 32, nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 72.780.728 kemudian nilai minimum sebesar Rp 3.932.834 dan nilai maximum sebesar Rp 4.870.008, sedangkan standard deviasi sebesar Rp 1.570.008 dan retribusi daerah nilai dari data (N) adalah 32, nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 25.572.558 kemudian nilai minimum sebesar Rp 1.360.000, dan nilai maximum sebesar Rp 1.240.008, sedangkan standard deviasi sebesar Rp 38.268.522. Jadi kesimpulan secara *descriptive* bahwa nilai minimum penerimaan pajak daerah lebih besar dari retribusi daerah, kemudian nilai maximum penerimaan pajak daerah lebih besar dari retribusi daerah, selanjutnya nilai rata-rata penerimaan pajak daerah lebih besar dari retribusi daerah,

dan nilai standar deviasi retribusi daerah lebih besar dari penerimaan pajak daerah.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang baik memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Normalitas dapat dideteksi dengan menggunakan JB (*Jarque Bera*), sebelum kita melakukan analisis yang sesungguhnya, data penelitian tersebut harus diuji kenormalannya. Untuk melihat apakah regresi data normal adalah jika nilai-nilai $p > 0,05$ maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan jika $p < 0,05$ maka diinterpretasikan sebagai tidak normal.

Gambar IV.1
Uji Normalitas Jarque-Bera (J-B)



Sumber: Data penelitian diolah, 2020

Normalitas dapat dideteksi dengan menggunakan uji *Jarque-Berra* (JB) uji JB merupakan uji normalitas berdasarkan pada koefisien kemiringan (*Skewness*). Dalam uji JB normalitas dapat dilihat dari

besaran nilai *probability* JB. Jika nilai *Probability* JB > 0,05 maka data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, menunjukkan bahwa nilai probabilitas JB sebesar 0,197 karena nilai probabilitas JB > 0,05 maka residual terdistribusi normal.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk melihat korelasi antara masing-masing variabel bebas. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu multikolinearitas maka dapat diketahui dari nilai korelasi antara dua variabel bebas tersebut. Apabila nilai korelasi kurang dari 0,8 maka variabel bebas tersebut tidak memiliki suatu masalah atau persoalan multikolinearitas, begitu juga dengan sebaliknya.

Tabel IV.9
Hasil Uji Multikolinearitas

	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
PAJAK DAERAH	1	0.9432173157829395
RETRIBUSI DAERAH	0.9432173157829395	1

Sumber: Data penelitian diolah, 2020

Berdasarkan hasil tabel IV.9 uji multikolinearitas di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinearitas karena koefisien antar variabel independen berada diatas syarat adanya multikolinearitas yaitu 0,8 persen. Pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai korelasi sebesar 0,943217. Korelasi ini berada di atas 0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Dalam penelitian ini uji autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin-Watson (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$, maka hipotesis ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- 2) Jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis diterima, yang berarti tidak terjadi autokorelasi.
- 3) Jika d terletak dL maka dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Tabel IV.10
Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.257114	Mean dependent var	10085351
Adjusted R-squared	0.205881	S.D. dependent var	15215798
S.E. of regression	13559312	Sum squared resid	5.330015
F-statistic	5.018475	Durbin-Watson stat	1.671962
Prob(F-statistic)	0.013439		

Sumber: Data penelitian diolah, 2020

Berdasarkan hasil tabel IV.10 uji diatas diperoleh nilai DW sebesar 1,671962 sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 (5%) dan jumlah data $(n) = 32$ dan jumlah variabel $(k) = 3$ diperoleh nilai dL sebesar 1,1976 dan dU sebesar 1,6499. Dimana $(4-dU)$ diperoleh hasil sebesar 2,3280, karena nilai $DW = 1,671962$ terletak antara $dU = 1,6499$ dan $(4-dU) = 2,3280$, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

e. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah:

H_0 = Tidak terdapat heteroskedastisitas

H_a = Terdapat heteroskedastisitas

Pengambilan keputusan dalam uji ini dilihat dari nilai *p-value* dibandingkan dengan nilai *alpha*. Ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$p\text{-value} > \alpha = H_0$ diterima

$p\text{-value} < \alpha = H_0$ ditolak

Tabel IV.11
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PENERIMAAN PAJAK DAERAH	-0.226887	0.134417	-1.687932	0.1022
RETRIBUSI DAERAH	1.313780	0.419826	3.129342	0.0040
C	45026744	16263357	2.768601	0.0097

Sumber: Data penelitian diolah, 2020

Berdasarkan hasil tabel IV.11 uji heteroskedastisitas diatas nilai probabilitas dari kedua variabel menunjukkan bahwa pada variabel X_1 nilai probabilitas lebih besar dari α (*alpha*) 0,05, dimana Penerimaan Pajak Daerah (PPD) sebesar 0,1022 dan pada variabel X_2 nilai probabilitas lebih kecil dari α (*alpha*) 0,05, dimana Retribusi Daerah (RD) sebesar

0,0040 sehingga diperoleh hasil yaitu H_0 ditolak berarti H_a diterima dan disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengukur secara terpisah kontribusi yang ditimbulkan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} :

$t_{hitung} < t_{tabel} = H_0$ diterima

$t_{hitung} > t_{tabel} = H_0$ ditolak

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model estimasi *random effects*. Hasil uji estimasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.12
Hasil Uji t

Variabel	t-Statistic	Prob.
C	2.768601	0.0097
PENERIMAAN PAJAK DAERAH	-1.687932	0.1022
RETRIBUSI DAERAH	3.129342	0.0040

Sumber: Data penelitian diolah, 2020

Berdasarkan tabel IV.12 hasil uji hipotesis diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah

Dilihat dari hasil uji t di atas diperoleh t_{hitung} sebesar 1,687932 < dari nilai t_{tabel} sebesar 1,69913 artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya bahwa penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara 2015-2018.

2) Retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah

Dilihat dari hasil uji t diatas diperoleh t_{hitung} sebesar 3,129342 > dari nilai t_{tabel} sebesar 1,69913 artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara 2015-2018.

b. Uji F (simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh sekelompok variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

H_a : Terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018.

Penetapan hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} . Nilai signifikansi yang digunakan adalah 0,05 derajat pembilang (dk_1) dihitung menggunakan rumus $k-1$, dimana n adalah jumlah seluruh observasi dan k adalah jumlah seluruh variabel. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 32 dan jumlah variabel adalah 3, maka dk_1 adalah 2 dan dk_2 adalah 29. Nilai F_{tabel} yang diperoleh adalah 3,33, ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$F_{hitung} < F_{tabel} = H_0$ diterima

$F_{hitung} > F_{tabel} = H_0$ ditolak

Tabel IV.13
Hasil Uji F

F-statistic	5.018475	Durbin-Watson stat	1.671962
Prob(F-statistic)	0.013439		

Sumber: Data penelitian diolah, 2020

Berdasarkan tabel IV.13 uji F diatas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 5,018475, nilai ini lebih besar dari nilai F_{tabel} sebesar 3,33 yaitu $5,018475 > 3,33$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara 2015-2018.

c. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua variabel independen dengan satu variabel dependen. Dalam hal ini peneliti ingin melihat seberapa besar pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara 2015-2018. Dalam penelitian ini nilai koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai *R-squared*.

Tabel IV.14
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.257114	Mean dependent var	10085351
Adjusted R-squared	0.205881	S.D. dependent var	15215798
S.E. of regression	13559312	Sum squared resid	5.330015
F-statistic	5.018475	Durbin-Watson stat	1.671962
Prob(F-statistic)	0.013439		

Sumber: Data penelitian diolah, 2020

Berdasarkan tabel IV.14 uji di atas, nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,257114 hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mampu menjelaskan bahwa variabel penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 25,71 persen. Sedangkan sisanya 74,29 persen di pengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

5. Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda

Regresi berganda digunakan untuk menguji signifikan ada atau tidaknya hubungan lebih dari dua variabel melalui koefisien regresinya. Model regresi dengan lebih dari satu variabel penjelas, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi variabel tidak bebas. Fungsi persamaan regresi selain untuk memprediksi nilai *dependent variable* (Y), juga dapat digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh *independent variable* (X) terhadap *dependent variable* (Y).

Hasil estimasi yang diperoleh menggunakan *random effects* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.15
Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 02/05/20 Time: 15:33
Sample: 2015 2018
Periods included: 4
Cross-sections included: 8
Total panel (balanced) observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	45026744	16263357	2.768601	0.0097
PENERIMAAN PAJAK DAERAH	-0.226887	0.134417	-1.687932	0.1022
RETRIBUSI DAERAH	1.313780	0.419826	3.129342	0.0040
Cross-section random			40158724	0.9023
Idiosyncratic random			13217174	0.0977
R-squared	0.257114	Mean dependent var		10085351
Adjusted R-squared	0.205881	S.D. dependent var		15215798
S.E. of regression	13559312	Sum squared resid		5.33E+15
F-statistic	5.018475	Durbin-Watson stat		1.671962
Prob(F-statistic)	0.013439			

Sumber: Data penelitian diolah, 2020

Dimana:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PPD : Penerimaan Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PAD = a + b_1 PPD + b_2 RD + e$$

Berdasarkan peranan di atas, maka diperoleh model regresi secara umum sebagai berikut:

$$PAD = 4,5026744 + (-0,226887)PPD + 1,313780 + e$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan hasil sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta dalam persamaan penelitian ini adalah 4,5026744 artinya bahwa penerimaan pajak daerah (X_1) dan retribusi daerah (X_2) bernilai 0 maka jumlah pendapatan asli daerah hanya sebesar 4,5026744 Miliar rupiah.
- b. Nilai koefisien pada regresi penerimaan pajak daerah sebesar 0,226887 bernilai negatif artinya jika pajak daerah bertambah 1 persen, maka jumlah pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,226887 Miliar, dengan asumsi variabel dianggap tetap.
- c. Nilai koefisien pada regresi retribusi daerah sebesar 1,313780 bernilai positif artinya jika luas retribusi daerah bertambah 1 Miliar, maka jumlah PAD mengalami peningkatan sebesar 1,313780, dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2018. Dari ketiga hasil uji *common effects*, *fixed effects*, dan *random effects* dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model estimasi *random effects*. Ketiga hasil uji yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tiga hasil menyatakan model estimasi *random effects* yang paling sesuai.

Hasil analisis regresi linear berganda diketahui nilai konstanta dalam persamaan penelitian ini adalah 4,5026744 artinya bahwa penerimaan pajak daerah (X_1) dan retribusi daerah (X_2) bernilai 0 maka jumlah pendapatan asli

daerah hanya sebesar 4,5026744 Miliar rupiah. Nilai koefisien pada regresi penerimaan pajak daerah sebesar 0,226887 bernilai negatif artinya jika penerimaan pajak daerah bertambah 1 persen, maka jumlah pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,226887 Miliar, dengan asumsi variabel dianggap tetap. Nilai koefisien pada regresi retribusi daerah sebesar 1,313780 bernilai positif artinya retribusi daerah bertambah 1 Miliar, maka jumlah PAD mengalami peningkatan sebesar 1,313780, dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

Hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,257114 hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mampu menjelaskan bahwa variabel penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 25,71 %. Sedangkan sisanya 74,29 % di pengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Selanjutnya hasil interpretasi dari hasil regresi tersebut terhadap signifikansi masing-masing variabel yang diteliti dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan program Eviews versi 9 uji signifikan parsial (uji t) maka diperoleh hasil t_{hitung} sebesar $1,689913 < \text{nilai } t_{tabel}$ sebesar 1,69913 artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya bahwa penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara 2015-2018.

Hasil penelitian ini didukung oleh Ignatius Beny Murti Pratama dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta”. Dengan hasil penelitian bahwa dari analisis trend dengan persamaan $Y' = 48,654\% - 1,092 (X)$ ditemukan bahwa kecenderungan perkembangan kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami penurunan, yang diperkuat dengan hasil pengujian hipotesa dengan uji-t diketahui bahwa $t_{hitung} 1,623 < 2,776 t_{tabel}$ sehingga H_0 diterima berarti tidak ada perkembangan kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kota Yogyakarta yang signifikan pada tahun 2004 hingga 2008.

Penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, dimana setiap peningkatan pajak daerah akan mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah.

Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan teori di atas, dimana penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018 disebabkan karena peningkatan pendapatan asli daerah bersumber dari peningkatan pada kelompok dana perimbangan, kelompok lain-lain pendapatan

daerah yang sah. Adapun kenaikan dana perimbangan bersumber dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah, dana penyesuaian dan otonomi khusus dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana tambahan penghasilan guru PNS daerah, perolehan dana insentif daerah.

2) Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dilihat dari hasil uji t diatas diperoleh t_{hitung} sebesar 3,129342 > dari nilai t_{tabel} sebesar 1,69913 artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara 2015-2018.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal dan Widhi Sunardika yang berjudul “Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung (Studi kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung periode 2009-2015)”. Dengan hasil regresi yang menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian ini juga didukung oleh teori Marihot P. Siahaan yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan perturan daerah sesuai dengan perturan perundang-undangan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, termasuk hasil dan pelayanan badan umum daerah, hasil

pengelolaan kekayaan pisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan Lain-lain PAD yang sah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, dimana semakin besar penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan pendapatan asli daerah.

3) Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan program Eviews versi 9 uji signifikan simultan (uji F), yang diperoleh hasil $F_{hitung} 5,018475 > 3,33$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara 2015-2018.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metodologi. Akan tetapi dalam prosesnya untuk mendapatkan hasil yang sempurna tidaklah mudah, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan peneliti yang dihadapi selama pelaksanaan penelitian dari penyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan variabel yang diteliti yaitu terbatas pada penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap

pendapatan asli daerah sementara masih banyak lagi variabel yang dapat diteliti.

2. Periode dalam penelitian sampel berupa data anggaran pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota menurut jenis pendapatan Provinsi Sumatera Utara yang relatif singkat, yaitu tahun 2015-2018 yang menyebabkan jumlah sampel pada penelitian ini 32 sampel.
3. Keterbatasan bahan materi seperti buku-buku referensi yang dibutuhkan peneliti dalam penulisan skripsi ini membuat peneliti mendapatkan sedikit kendala dalam teorinya.

Walaupun demikian, peneliti berusaha sebaik mungkin agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi kesempurnaan penelitian ini. Akhirnya dengan segala upaya, kerja keras, dan bantuan semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018”. Dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara parsial (uji t) diperoleh t_{hitung} sebesar $1,689913 < t_{tabel} 1,69913$ artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya bahwa penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara 2015-2018.
2. Secara parsial (uji t) diperoleh t_{hitung} sebesar $3,129342 > t_{tabel} 1,69913$ artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara 2015-2018.
3. Adanya pengaruh antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara 2015-2018 secara bersama-sama (simultan) dengan nilai $F_{hitung} 5,018475 > F_{tabel} 3,33$.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, ada beberapa hal yang ingin peneliti sampaikan yang semoga memberikan manfaat bagi pihak ekonomi dan pihak peneliti selanjutnya tentang judul penelitian “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018”.

- a. Bagi Pemerintah, banyak faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah selain dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah masih ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara 2015-2018 diharapkan pemerintah menyediakan program-program yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara. Bagi masyarakat dengan adanya program-program yang diadakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, masyarakat diharapkan untuk turut serta dalam mengikuti program-program tersebut.
- b. Bagi peneliti selanjutnya di harapkan dapat menambah variabel lain yang berkaitan dengan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018 agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik. Selain itu peneliti selanjutnya di harapkan dapat menambah jumlah sampel yang diteliti sehingga diperoleh data yang akurat.
- c. Kepada pembaca skripsi ini diharapkan dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini, karena keterbatasan bahan materi seperti buku-buku referensi yang dibutuhkan peneliti dalam penulisan skripsi ini Dan skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dunia ekonomi bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008.
- Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Damodar N, Gujarati, *Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid Kesatu*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Imam Ghazali dan Dwi Ratmono, *Analisis Multivariat dan Ekonometrika*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2013.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Jaka Sriyana, *Metode Regresi Data Panel*, Yogyakarta: Ekonisia, 2014.
- Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008.
- Muhammad Zain dan Suryo Hermana, *Himpunan Undang-Undang Perpajakan 2010*, Jakarta: PT Indeks, 2010.
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Nur Asnawi dan Masyhuti, *Metode Manajemen Pemasaran*, Malang: UIN. Maliki Pers, 2011.
- Rasyid Abdul Mun'im Ar-Raja, *Tafsir Ibnu Abbas*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Setiawan dan Dwi Endah, *Ekonometrika*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Sochrul Ajija, dkk, *Cara Cerdas Menguasai Eviews*, Jakarta: Selemba Empat, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharismi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Toha Anggoro, dkk, *Metode Penelitian Edisi 2*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.

Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2002.

Wing Wahyu Winardo, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi 4*, Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2015.

Sumber Jurnal dan Skripsi

Achmad Naufal Fachreza, “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Kontruksi di Kabupaten Provinsi Jawa Timur 2011-2015”, dalam *Jurnal Ekonomi*, Volume 15, No.2, Desember 2017.

Arief Himmawan dan Djoko Wahjudi, “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang Dan Surakarta)”, dalam *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 21, No. 2, September 2014.

Hibzon, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan”, dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 5, No. 2, Desember, 2007.

Mardani Nursali, “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan “, dalam *Skripsi*, 2017.

Mesra, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara”, dalam *Jurnal Manajemen Tools*, Vol. 8, No. 2, Desember, 2017.

Muhammad Iqbal dan Widhi Sunardika, “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009-2015)”, dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 9, No. 1, Januari-April, 2018.

Novriyanti Jambak, “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2014”, *Skripsi*, IAIN Padangsidimpuan, 2016.

Puja Rizqy Ramadhan, “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”, dalam *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 5, Mei, 2019.

Sumber Pendukung dari Internet

BPS Provinsi Sumatera Utara, *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2018* (Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2018).

Marulamasina, “Sejarah Sumatera Utara” <https://amp-kaskus-co.id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kaskus.co.id>, diakses 29 Januari 2020 pukul 10.43 WIB.

www.bps.com. diakses pada Selasa, 12 November 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Monalisah Harahap
2. Tempat/ Tgl. Lahir : Sitinjak, 01 Maret 1998
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Lingkungan IV, Kelurahan Sitinjak
Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli
Selatan, Provinsi Sumatera Utara
6. Email : monalisahrp98@gmail.com
7. No. Handphone : 0821 6825 2282

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 100040 Sitinjak (2005-2010)
2. MTs Yayasan Pendidikan Karya Setia Padangsidempuan (2010-2013)
3. SMK Negeri 1 Padangsidempuan (2013-2016)
4. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (2016-2020)

III. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Akhir Harahap
2. Pekerjaan : Petani
3. Nama Ibu : Nurita Ritonga
4. Pekerjaan : Petani

IV. MOTTO HIDUP

“Hidup hanyalah sekali maka berbuatlah yang terbaik”

LAMPIRAN 1: DATA PENELITIAN

Data Penerimaan Pajak Daerah (Variabel X₁) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2018 (Dalam ribu rupiah).

No.	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Jumlah (Rp)
1.	Kabupaten Tapanuli Selatan	2015	24.315.707
		2016	27.940.052
		2017	17.370.629
		2018	19.536.571
2.	Kabupaten Dairi	2015	7.766.000
		2016	8.766.000
		2017	9.266.000
		2018	14.211.500
3.	Kabupaten Deli Serdang	2015	463.126.092
		2016	487.186.468
		2017	484.520.000
		2018	484.520.000
4.	Kabupaten Nias Selatan	2015	15.330.442
		2016	3.932.834
		2017	4.542.498
		2018	5.812.926
5.	Kabupaten Samosir	2015	5.153.000
		2016	6.334.000
		2017	13.130.000
		2018	13.617.042
6.	Kabupaten Nias Utara	2015	6.500.000
		2016	5.900.000
		2017	3.945.000
		2018	3.945.000
7.	Kota Pematangsiantar	2015	33.206.827
		2016	35.715.000
		2017	39.730.000
		2018	40.100.000
8.	Kota Gunungsitoli	2015	9.513.250
		2016	8.274.492
		2017	8.905.927
		2018	16.870.044

Data Retribusi Daerah (Variabel X₂) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2018 Dalam ribu rupiah).

No.	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Jumlah (Rp)
1.	Kabupaten Tapanuli Selatan	2015	8.274.492
		2016	8.274.492
		2017	8.905.927
		2018	16.870.044
2.	Kabupaten Dairi	2015	34.528.145
		2016	45.717.493
		2017	30.666.560
		2018	49.628.550
3.	Kabupaten Deli Serdang	2015	118.850.165
		2016	124.485.665
		2017	112.795.775
		2018	122.642.060
4.	Kabupaten Nias Selatan	2015	29.686.215
		2016	4.785.675
		2017	3.389.889
		2018	4.537.087
5.	Kabupaten Samosir	2015	10.174.136
		2016	3.433.650
		2017	5.085.880
		2018	7.179.075
6.	Kabupaten Nias Utara	2015	1.500.000
		2016	2.100.000
		2017	1.360.000
		2018	1.360.000
7.	Kota Pematangsiantar	2015	11.533.155
		2016	9.756.178
		2017	7.754.773
		2018	13.299.773
8.	Kota Gunungsitoli	2015	10.900.000
		2016	1.587.000
		2017	4.210.000
		2018	3.050.000

Data Pendapatan Asli Daerah (Variabel Y) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2018 Dalam ribu rupiah).

No.	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Jumlah (Rp)
1.	Kabupaten Tapanuli Selatan	2015	98.438.746
		2016	90.666.249
		2017	81.435.847
		2018	110.678.075
2.	Kabupaten Dairi	2015	60.481.900
		2016	75.647.999
		2017	66.344.330
		2018	101.426.328
3.	Kabupaten Deli Serdang	2015	60.481.900
		2016	75.647.999
		2017	66.344.330
		2018	101.426.328
4.	Kabupaten Nias Selatan	2015	50.640.920
		2016	14.110.807
		2017	14.160.411
		2018	21.079.237
5.	Kabupaten Samosir	2015	26.595.698
		2016	30.786.029
		2017	3.255.677
		2018	54.289.358
6.	Kabupaten Nias Utara	2015	30.000.000
		2016	28.000.000
		2017	32.005.000
		2018	71.897.203
7.	Kota Pematangsiantar	2015	130.134.852
		2016	111.207.722
		2017	118.148.890
		2018	128.188.367
8.	Kota Gunungsitoli	2015	34.400.000
		2016	28.000.000
		2017	34.937.400
		2018	36.676.263

Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2015

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	Retribusi Daerah <i>Local Retribution</i>	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Output of Management of Separated Regional Government Wealth</i>	Lain-lain PAD yang Sah <i>Others Receipt</i>	Jumlah <i>Total</i>
Kabupaten/Regency					
01 Nias	4 203 000	1 868 200	10 300 000	46 856 500	63 227 700
02 Mandailing Natal	19 330 000	15 852 097	10 000 000	20 538 498	65 720 595
03 Tapanuli Selatan	24 315 707	8 274 492	47 118 151	18 730 395	98 438 746
04 Tapanuli Tengah	12 154 983	3 255 926	7 726 620	24 582 916	47 720 445
05 Tapanuli Utara	9 510 525	23 840 418	9 000 000	7 649 057	50 000 000
06 Toba Samosir	11 698 367	6 107 048	2 100 000	14 292 560	34 197 975
07 Labuhanbatu	62 700 000	48 241 585	15 500 000	19 849 115	146 290 701
08 Asahan	31 241 119	7 260 372	4 399 812	28 354 586	71 255 889
09 Simalungun	80 716 255	7 848 034	18 000 000	5 850 000	112 414 289
10 Dairi	7 766 000	34 528 145	4 500 000	13 687 755	60 481 900
11 Karo	28 023 050	19 634 169	2 800 000	3 100 000	53 557 219
12 Deli Serdang	463 126 092	118 850 165	15 000 000	33 744 445	630 720 702
13 Langkat	42 120 000	16 927 479	5 200 000	46 652 872	110 900 351
14 Nias Selatan	15 330 442	29 686 215	2 524 262	3 100 000	50 640 920
15 Humbang Hasundutan	3 961 715	3 863 511	2 612 590	17 314 712	27 752 527

16 Pakpak Bharat	2 144 273	3 345 872	1 600 000	7 870 535	14 960 679
17 Samosir	5 153 000	10 174 136	1 650 000	9 618 562	26 595 698
18 Serdang Bedagai	29 812 000	34 937 865	-	7 668 756	72 418 621
19 Batu Bara	21 672 500	7 563 500	-	14 125 398	43 361 398
20 Padang Lawas Utara	5 595 084	17 576 342	-	3 144 420	26 315 846
21 Padang Lawas	8 310 698	4 669 021	4 900 000	22 237 580	40 117 300
22 Labuhanbatu Selatan	15 204 204	10 055 000	-	14 640 946	39 900 150
23 Labuhanbatu Utara	14 880 000	4 644 610	-	10 896 474	30 421 084
24 Nias Utara	6 500 000	1 500 000	-	22 000 000	30 000 000
25 Nias Barat	7 594 400	3 829 500	-	8 576 100	20 000 000

Kota/City					
71 Sibolga	7 411 489	32 671 665	14 000 000	6 448 000	60 531 154
72 Tanjungbalai	2 708 466	2 033 736	-	1 198 526	5 940 728
73 Pematangsiantar	33 206 827	11 533 155	9 474 493	75 920 377	130 134 852
74 Tebing Tinggi	16 418 500	4 384 770	5 000 000	41 387 136	67 190 406
75 Medan	1 249 252 602	175 768 890	7 405 019	246 810 652	1 679 237 163
76 Binjai	27 869 424	52 443 065	1 861 898	6 500 000	88 674 387
77 Padangsidempuan	11 542 225	33 278 866	6 556 831	4 649 950	56 027 872
78 Gunungsitoli	9 513 250	10 900 000	-	13 986 750	34 400 000
Jumlah/Total	2 290 986 197	767 347 849	199 959 676	821 983 573	4 089 547 297

**Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota
menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2016**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pajak Daerah Local Taxes	Retribusi Daerah Local Retribution	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Output of Management of Separated Regional Government Wealth	Lain-lain PAD yang Sah Others Receipt	Jumlah /Total
<i>Kabupaten/Regency</i>					
01 N i a s	4 547 870	2 206 200	10 300 000	52 360 400	69 414 470
02 Mandailing Natal	19 330 000	24 302 097	10 000 000	31 876 898	85 508 995
03 Tapanuli Selatan	27 940 052	8 274 492	35 721 309	18 730 396	90 666 249
04 Tapanuli Tengah	13 638 019	4 028 651	8 720 621	37 618 000	64 005 291
05 Tapanuli Utara	10 030 000	30 520 000	7 250 000	19 383 704	67 183 704
06 Toba Samosir	12 048 367	6 479 213	3 100 000	15 824 000	37 451 580
07 Labuhanbatu	62 700 000	9 241 585	21 950 000	67 994 593	161 886 178
08 A s a h a n	42 930 449	9 586 407	4 399 812	47 900 000	104 816 668
09 Simalungun	50 525 000	10 076 451	18 000 000	41 378 823	119 980 275
10 D a i r i	8 766 000	45 717 493	7 026 751	14 137 755	75 647 999
11 K a r o	30 518 010	12 258 339	2 800 000	47 082 949	92 659 298
12 Deli Serdang	487 186 468	124 485 665	18 000 000	42 556 882	672 229 015
13 L a n g k a t	45 458 000	16 502 479	5 200 000	48 152 873	115

					313 352
14 Nias Selatan	3 932 834	4 785 675	1 527 146	3 865 152	14 110 807
15 Humbang Hasundutan	5 159 233	4 458 583	2 612 590	22 814 712	35 045 117
16 Pakpak Bharat	1 998 842	4 247 300	1 600 000	7 389 045	15 235 187
17 Samosir	6 334 000	3 433 650	1 650 000	19 368 379	30 786 029
18 Serdang Bedagai	42 340 000	16 551 041	-	30 368 902	89 259 944
19 Batu Bara	22 272 500	7 563 500	-	20 590 645	50 426 645
20 Padang Lawas Utara	6 562 428	3 083 139	-	22 520 392	32 165 959
21 Padang Lawas	11 424 662	5 476 085	4 650 000	28 440 500	49 991 247
22 Labuhanbatu Selatan	16 624 204	10 360 000	-	14 185 338	41 169 542
23 Labuhanbatu Utara	16 380 000	6 721 552	500 000	11 724 502	35 326 054
24 Nias Utara	5 900 000	2 100 000	-	20 000 000	28 000 000
25 Nias Barat	7 594 400	3 829 500	-	12 576 100	24 000 000
<i>Kota/Municipality</i>					
71 Sibolga	7 702 745	4 372 650	8 642 621	44 441 328	65 159 344
72 Tanjungbalai	10 658 500	25 601 771	5 400 000	22 238 353	63 898 624
73 Pematangsiantar	35 715 000	9 756 178	12 701 665	53 034 879	111 207 722
74 Tebing Tinggi	18 177 000	4 690 778	10 882 000	52 365 776	86 115 554
75 Medan	1 316 127 547	184 415 400	10 312 869	316 341 012	1 827 196 828
76 Binjai	33 296 002	45 078 954	3 100 000	7 199 431	88 674 387
77 Padangsidempuan	11 542 225	43 167 531	9 748 095	4 649 950	69 107 801
78 Gunungsitoli	12 355 000	1 587 000	-	14 058 000	28 000 000
Jumlah/Total	2 407 715 357	694 959 360	225 795 478	1 213 169 669	4 541 639 863

Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2017

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	Retribusi Daerah <i>Local Retribution</i>	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Output of Management of Separated Regional Government Wealth</i>	Lain-lain PAD yang Sah <i>Others Receipt</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Kabupaten/Regency	1 004 535 055	392 677 479	173 025 266	889 609 678	2 459 847 477
01 Nias	5 005 000	2 421 000	9 000 000	60 796 210	77 222 210
02 Mandailing Natal	20 267 538	34 275 520	11 000 000	34 568 711	100 111 770
03 Tapanuli Selatan	17 370 629	8 905 927	40 360 000	14 799 291	81 435 847
04 Tapanuli Tengah	15 565 043	3 665 526	9 361 985	43 777 381	72 369 935
05 Tapanuli Utara	11 910 849	45 794 848	7 750 000	29 167 812	94 623 509
06 Toba Samosir	12 946 035	6 797 281	3 661 207	20 963 047	44 367 570
07 Labuhanbatu	49 550 000	11 617 949	15 000 000	87 821 740	163 989 690
08 Asahan	39 233 008	8 486 750	4 399 812	55 770 619	107 890 188
09 Simalungun	75 350 000	9 264 000	18 000 000	111 175 585	213 789 585
10 Dairi	9 266 000	30 666 560	10 029 770	16 382 000	66 344 330
11 Karo	40 794 923	13 322 128	2 800 000	47 082 949	104 000 000
12 Deli Serdang	484 520 000	112 795 775	19 800 000	45 500 000	662 615 775
13 Langkat	50 056 000	20 444 850	5 200 000	55 375 573	131 076 423
14 Nias Selatan	4 542 498	3 389 889	2 908 932	3 319 091	14 160 411
15 Humbang Hasundutan	6 029 770	4 573 173	2 683 962	28 392 406	41 679 311
16 Pakpak Bharat	4 391 000	11 046 720	1 200 000	7 659 456	24 297 176
17 Samosir	13 130 000	5 085 880	3 269 597	51 770 200	73 255 677
18 Serdang Bedagai	51 067 000	16 087 440	0	35 325 421	102 479 861
19 Batu Bara	24 272 500	5 568 000	0	21 750 000	51 590 500
20 Padang Lawas Utara	6 880 372	10 199 677	0	18 070 392	35 150 441
21 Padang Lawas	12 874 786	5 140 468	4 600 000	29 684 500	52 299 754
22 Labuhanbatu Selatan	16 624 204	10 360 000	0	14 185 338	41 169 542
23 Labuhanbatu Utara	20 380 000	7 612 117	1 500 000	13 690 855	43 182 972
24 Nias Utara	3 945 000	1 360 000	500 000	26 200 000	32 005 000
25 Nias Barat	8 562 900	3 796 000	0	16 381 100	28 740 000
Kota/Municipality	1 525 996 226	325 752 302	72 187 575	633 634 150	2 557 570 253
71 Sibolga	7 965	5 011 755	14 398 829	51 078 452	78 454

	377				412
72 Tanjungbalai	11 658 500	26 018 569	5 400 000	22 238 353	65 315 422
73 Pematangsiantar	39 730 000	7 754 773	10 162 494	60 501 623	118 148 890
74 Tebing Tinggi	21 357 000	4 155 778	13 000 000	58 840 921	97 353 699
75 Medan	1 380 127 548	257 773 650	12 181 227	323 697 914	1 973 780 339
76 Binjai	36 125 022	7 348 988	4 212 979	50 596 105	98 283 092
77 Padangsidempuan	15 032 780	13 478 789	12 832 046	49 953 384	91 296 999
78 Gunungsitoli	14 000 000	4 210 000	0	16 727 400	34 937 400
Jumlah/Total	2 530 531 281	718 429 781	245 212 840	1 523 243 828	5 017 417 730

**Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota
menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2018**

<i>Kabupaten/Kota Regency/Municipality</i>	<i>Pajak Daerah Local Taxes</i>	<i>Retribusi Daerah Local Retribution</i>	<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Output of Management of Separated Regional Government Wealth</i>	<i>Lain-lain PAD yang Sah Others Receipt</i>	<i>Jumlah Total</i>
Kabupaten/Regency					
01 Nias	5 155 000	2 731 000	9 000 000	64 507 907	81 393 907
02 Mandailing Natal	22 362 096	44 534 316	12 430 000	38 335 358	117 661 770
03 Tapanuli Selatan	19 536 571	16 870 044	57 272 169	16 999 291	110 678 075
04 Tapanuli Tengah	29 115 256	4 679 874	12 654 343	53 550 527	100 000 000
05 Tapanuli Utara	16 970 000	8 373 500	7 750 000	76 915 090	110 008 590
06 Toba Samosir	15 414 900	6 352 188	4 817 211	23 563 047	50 147 346
07 Labuhanbatu	49 550 000	12 037 949	17 500 000	101 874 738	180 962 687
08 Asahan	43 547 841	9 261 761	5 452 039	63 445 966	121 707 607
09 Simalungun	98 950 000	16 403 500	25 500 000	520 961 702	661 815 202
10 Dairi	14 211 500	49 628 550	13 191 278	24 395 000	101 426 328
11 Karo	40 794 924	14 375 475	2 943 343	89 637 235	147 750 976
12 Deli Serdang	660	122 642	19 800 000	197 863 000	1 000

	622 000	060			927 060
13 L a n g k a t	57 560 000	22 899 179	5 200 000	58 391 668	144 050 847
14 Nias Selatan	5 812 926	4 537 087	4 160 000	6 569 224	21 079 237
15 Humbang Hasundutan	7 529 820	5 106 173	5 609 094	43 471 790	61 716 877
16 Pakpak Bharat	3 571 200	6 896 509	1 200 000	16 501 939	28 169 648
17 Samosir	13 617 042	7 179 075	5 000 000	28 493 241	54 289 358
18 Serdang Bedagai	65 240 000	17 330 060	11 000 000	125 586 924	219 156 984
19 Batu Bara	31 888 002	5 743 000	0	25 594 914	63 225 916
20 Padang Lawas Utara	7 947 449	24 139 103	0	18 132 883	50 219 435
21 Padang Lawas	13 475 925	4 641 877	4 300 000	37 150 470	59 568 272
22 Labuhanbatu Selatan	21 200 941	16 381 750	1 500 000	18 208 014	57 290 705
23 Labuhanbatu Utara	24 240 000	10 092 928	2 000 000	14 736 193	51 069 121
24 Nias Utara	3 945 000	1 360 000	1 500 000	65 092 203	71 897 203
25 Nias Barat	7 500 000	4 500 000	736 840	37 263 160	50 000 000
Kota/Municipality					
71 S i b o l g a	9 616 350	4 931 088	14 398 829	79 183 105	108 129 371
72 Tanjungbalai	13 458 500	24 650 846	6 000 000	24 951 295	69 060 641
73 Pematangsiantar	40 100 000	13 299 773	8 386 970	66 401 623	128 188 367
74 Tebing Tinggi	24 226 943	4 758 000	13 500 000	63 095 008	105 579 951
75 M e d a n	1 511	250 841	12 300 000	338 521 559	2 112

	000 000	500			663 059
76 Binjai	55 094 448	7 309 104	4 212 979	69 416 617	136 033 148
77 Padangsidempuan	17 707 780	12 924 777	16 912 715	45 778 384	93 323 656
78 Gunungsitoli	16 150 000	3 050 000	0	17 476 263	36 676 263
Jumlah/Total	2 967 112 413	760 462 046	306 227 810	2 472 065 338	6 505 867 607

LAMPIRAN 2: HASIL ESTIMASI COMMON EFFECTS MODEL

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 02/05/20 Time: 15:31

Sample: 2015 2018

Periods included: 4

Cross-sections included: 8

Total panel (balanced) observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	53640250	8419485.	6.370966	0.0000
X1	-0.085304	0.125366	-0.680442	0.5016
X2	0.574001	0.513360	1.118127	0.2727
R-squared	0.079926	Mean dependent var		62110433
Adjusted R-squared	0.016472	S.D. dependent var		36636984
S.E. of regression	36333982	Akaike info criterion		37.74347
Sum squared resid	3.83E+16	Schwarz criterion		37.88088
Log likelihood	-600.8954	Hannan-Quinn criter.		37.78901
F-statistic	1.259598	Durbin-Watson stat		0.285457
Prob(F-statistic)	0.298835			

FIXED EFFECTS MODEL

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 03/12/20 Time: 09:24

Sample: 2015 2018

Periods included: 4

Cross-sections included: 8

Total panel (balanced) observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-16679019	36408558	-0.458107	0.6514
X1	0.607161	0.522035	1.163066	0.2573
X2	1.353006	0.447092	3.026240	0.0062

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.907637	Mean dependent var	62110433
Adjusted R-squared	0.869852	S.D. dependent var	36636984
S.E. of regression	13217174	Akaike info criterion	35.88224
Sum squared resid	3.84E+15	Schwarz criterion	36.34028
Log likelihood	-564.1158	Hannan-Quinn criter.	36.03407
F-statistic	24.02113	Durbin-Watson stat	2.289676
Prob(F-statistic)	0.000000		

RANDOM EFFECTS MODEL

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 02/05/20 Time: 15:33

Sample: 2015 2018

Periods included: 4

Cross-sections included: 8

Total panel (balanced) observations: 32

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	45026744	16263357	2.768601	0.0097
X1	-0.226887	0.134417	-1.687932	0.1022
X2	1.313780	0.419826	3.129342	0.0040
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			40158724	0.9023
Idiosyncratic random			13217174	0.0977
Weighted Statistics				
R-squared	0.257114	Mean dependent var		10085351
Adjusted R-squared	0.205881	S.D. dependent var		15215798
S.E. of regression	13559312	Sum squared resid		5.33E+15
F-statistic	5.018475	Durbin-Watson stat		1.671962
Prob(F-statistic)	0.013439			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.001152	Mean dependent var		62110433
Sum squared resid	4.17E+16	Durbin-Watson stat		0.213993

LAMPIRAN 3: UJI ESTIMASI DATA PANEL

UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FE

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	28.164667	(7,22)	0.0000
Cross-section Chi-square	73.559237	7	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 02/05/20 Time: 15:33

Sample: 2015 2018

Periods included: 4

Cross-sections included: 8

Total panel (balanced) observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	53640250	8419485.	6.370966	0.0000
X1	-0.085304	0.125366	-0.680442	0.5016
X2	0.574001	0.513360	1.118127	0.2727
R-squared	0.079926	Mean dependent var		62110433
Adjusted R-squared	0.016472	S.D. dependent var		36636984
S.E. of regression	36333982	Akaike info criterion		37.74347
Sum squared resid	3.83E+16	Schwarz criterion		37.88088
Log likelihood	-600.8954	Hannan-Quinn criter.		37.78901
F-statistic	1.259598	Durbin-Watson stat		0.285457
Prob(F-statistic)	0.298835			

UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RE

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.520809	2	0.1720

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.607161	-0.226887	0.254452	0.0982
X2	1.353006	1.313780	0.023637	0.7986

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 02/05/20 Time: 15:34

Sample: 2015 2018

Periods included: 4

Cross-sections included: 8

Total panel (balanced) observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-16679019	36408558	-0.458107	0.6514
X1	0.607161	0.522035	1.163066	0.2573
X2	1.353006	0.447092	3.026240	0.0062

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.907637	Mean dependent var	62110433
Adjusted R-squared	0.869852	S.D. dependent var	36636984
S.E. of regression	13217174	Akaike info criterion	35.88224
Sum squared resid	3.84E+15	Schwarz criterion	36.34028
Log likelihood	-564.1158	Hannan-Quinn criter.	36.03407
F-statistic	24.02113	Durbin-Watson stat	2.289676
Prob(F-statistic)	0.000000		

UJI LAGRANGE MULTIPLIER

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

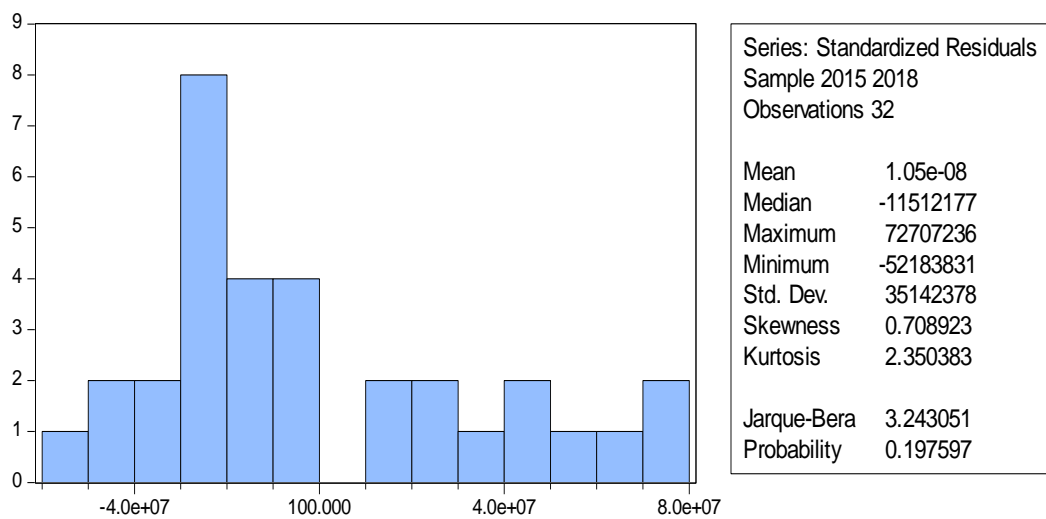
	Cross-section	Test Hypothesis	
		Time	Both
Breusch-Pagan	32.68970 (0.0000)	0.474116 (0.4911)	33.16381 (0.0000)
Honda	5.717491 (0.0000)	-0.688561 --	3.555990 (0.0002)
King-Wu	5.717491 (0.0000)	-0.688561 --	2.555507 (0.0053)
Standardized Honda	7.223077 (0.0000)	-0.444916 --	1.822956 (0.0342)
Standardized King- Wu	7.223077 (0.0000)	-0.444916 --	0.731832 (0.2321)
Gourieriou, et al.*	--	--	32.68970 (< 0.01)
*Mixed chi-square asymptotic critical values:			
	1%	7.289	
	5%	4.321	
	10%	2.952	

LAMPIRAN 4: UJI ASUMSI KLASIK

UJI DESKRIPTIF

	X1	X2
Mean	72780728	25572558
Median	13373521	8590210.
Maximum	4.870008	1.240008
Minimum	3932834.	1360000.
Std. Dev.	1.57E+08	38268522
Skewness	2.250050	1.870637
Kurtosis	6.105538	5.006573
Jarque-Bera	39.86036	24.03129
Probability	0.000000	0.000006
Sum	2.33E+09	8.18E+08
Sum Sq. Dev.	7.61E+17	4.54E+16
Observations	32	32

UJI NORMALITAS



UJI MULTIKOLINEARITAS

	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
PAJAK DAERAH	1	0.9432173157829395
RETRIBUSI DAERAH	0.9432173157829395	1

UJI AUTOKORELASI

R-squared	0.257114	Mean dependent var	10085351
Adjusted R-squared	0.205881	S.D. dependent var	15215798
S.E. of regression	13559312	Sum squared resid	5.33E+15
F-statistic	5.018475	Durbin-Watson stat	1.671962
Prob(F-statistic)	0.013439		

UJI HETEROSKEDASITAS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PENERIMAAN PAJAK DAERAH	-0.226887	0.134417	-1.687932	0.1022
RETRIBUSI DAERAH	1.313780	0.419826	3.129342	0.0040
C	45026744	16263357	2.768601	0.0097

LAMPIRAN 5: UJI HIPOTESIS

UJI t

Variabel	t-Statistic	Prob.
C	2.768601	0.0097
PENERIMAAN PAJAK DAERAH	-1.687932	0.1022
RETRIBUSI DAERAH	3.129342	0.0040

UJI F

F-statistic	5.018475	Durbin-Watson stat	1.671962
Prob(F-statistic)	0.013439		